

MENGUKUR KUALITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH/ PROTOKOL KESEHATAN DI RUANG REKREASI

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

MEMBANGUN SISTEM PENDATAAN SKALA BESAR

MONETISASI MAHA DATA (*BIG DATA*) MENJADI PENTING AGAR KEBIJAKAN YANG DILAHIRKAN TAK LAGI BERDASARKAN INTUISI.



VOL 5 NO 4 JULI-AGUSTUS 2020
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID
MAJALAH DWI BULANAN
P-ISSN 2503 3352
E-ISSN 2528 4181

Call for Papers

MATRA PEMBARUAN

(Nomor Akreditasi: 14/E/KPT/2019 (SINTA 3))



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2020, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu **Mei dan November**.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA
GARDA RUJUKAN DIGITAL

Crossref

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0858 1325 8250/Rifky (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Kebijakan yang disusun oleh pemerintah sudah semestinya berbasis pada data. Dengan memanfaatkan data yang akurat, kebijakan yang dikeluarkan dapat menjadi langkah ampuh dalam mengatasi persoalan. Upaya ini salah satunya bisa dilakukan dengan membangun sebuah indeks, sebagai alat ukur untuk menilai suatu kondisi. Saat ini pemerintah Indonesia memang telah membangun banyak indeks yang tersebar di kementerian maupun lembaga. Sejumlah indeks tersebut misalnya, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda Indonesia, indeks kedalaman kemiskinan dan masih banyak indeks lainnya.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri pun demikian. Selain melakukan kegiatan ke-litbangan, Badan Litbang Kemendagri juga membangun tiga indeks untuk membina sekaligus mengawasi jalannya pemerintah daerah. Ketiga indeks itu di antaranya indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, dan terakhir indeks kepemimpinan kepala daerah. Penggunaan indeks meniscayakan pengukuran terhadap suatu hal lebih teruji dengan alat ukur dan perumusan yang jelas. Dari indeks ini, Badan Litbang Kemendagri mampu memetakan kondisi masing-masing daerah, sehingga memudahkan pembinaan.



Terkait itu, pada edisi Agustus 2020, Media BPP berupaya mengulas bagaimana ikhtiar Badan Litbang Kemendagri membangun indeks untuk mendukung kemajuan pemerintah daerah. Di samping itu, berbagai informasi menarik lainnya juga telah tersaji dalam ragam rubrik. Informasi itu misalnya, aktivitas Badan Litbang Kemendagri yang terus menjaga ritme bekerja meski di tengah pandemi. Ada pula cerita bagaimana pemerintah daerah menerapkan protokol kesehatan di sejumlah tempat rekreasi. Selain itu, dalam rubrik Lebih Dekat, Media BPP mengulas sosok Aditya Perdana, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Aditya banyak bercerita seputar kajian pemilu dan konsennya terhadap keterwakilan perempuan di panggung politik.

Berbagai informasi yang disuguhkan, merupakan wujud istikamah Media BPP untuk tetap hadir sebagai pengabar yang mampu membangun kemajuan. Dengan narasi yang dihadirkan, diharapkan publik semakin paham ihwal berbagai upaya yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri. Sebagai lembaga *think tank* Kemendagri, Badan Litbang terus berusaha melakukan perbaikan, sehingga mampu menghadirkan kinerja yang andal.

Selamat membaca...

Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN
PENANGGUNG JAWAB A FATONI

PEMIMPIN REDAKSI	KURNIASIH
REDAKTUR PELAKSANA	AJI NUR CAHYO
REDAKTUR	KURNIASIH MATHEOS TAN DEDDY WINARWAN SUGENG HARIYONO
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK	SAIDI RIFKY
ILUSTRASI COVER	TRES AUGUST
INFOGRAFIK	FAJAR HARAMUKTI

bina praja
press

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

Penyiapan Tatanan Normal Baru

Belum lama ini pemerintah menggulirkan wacana penerapan tatanan normal baru produktif dan aman dari Covid-19. Seperti diketahui penerapan itu membutuhkan sejumlah strategi khusus agar masyarakat benar-benar siap dengan tatanan normal baru. Lantas bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintah dalam mendukung upaya penerapan itu.

-Pembaca Media BPP-

Banyak ilmuwan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memprediksi pandemi ini akan berlangsung lama. Sampai dengan saat ini vaksin untuk menangani Covid-19 belum ditemukan. Dunia sedang bersiap untuk menghadapi tatanan normal baru. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang terus mengkaji secara serius tatanan yang dimaksud dengan produktif dan aman Covid-19. Tatanan ini tidak lantas membuat pemerintah kendur dalam melawan pandemi. Justru pemerintah terus melakukan langkah strategis untuk menghadapi virus, sekaligus pencegahan dan penanganan, juga berupaya menemukan vaksinnya. Sebagai sesuatu yang baru, masyarakat perlu dikenalkan dengan tatanan ini. Karenanya, Kemendagri telah menggelar lomba inovasi daerah bertajuk "Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19". Dengan lomba ini diharapkan pemerintah daerah termasuk masyarakatnya semakin mempersiapkan diri jika tatanan ini diterapkan.

Redaksi

Penerapan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pilkada 2020

Penyelenggara pemilu sepakat pemilihan kepala daerah 2020 berlangsung pada 9 Desember 2020. Artinya, tahapan yang sempat tertunda telah kembali dilanjutkan. Pelaksanaan ini tentu membutuhkan banyak persiapan karena berlangsung di tengah pandemi. Lantas, bagaimana peran Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini tetap dalam kondisi yang aman dari Covid-19.

-Pembaca Media BPP-

Di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, secara tegas mengingatkan agar di setiap tahapan pemilihan kepala

daerah (Pilkada) serentak 2020, menerapkan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Salah satu tahapan yang perlu mendapat perhatian adalah tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan secara door to door. Seperti diketahui, tahapan Pilkada serentak 2020 yang sempat terhenti, telah kembali dilanjutkan pada 15 Juni 2020 kemarin. Pilkada di tengah pandemi memang memiliki kerawanan kesehatan, di samping kerawanan sengketa, konflik, dan lain-lainnya. Namun beberapa negara tetap melaksanakannya (tahapan pemilihan) dan sebagian besar pelaksanaannya sesuai jadwal yakni pada 2020 dengan catatan memerhatikan protokol kesehatan. Kemendagri juga terus mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Bawaslu juga menegaskan, protokol kesehatan akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan dan pengawasan Pilkada serentak 2020.

Redaksi

Kualitas Pelayanan Publik Di Tengah Pandemi Jangan Sampai Menurun

Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah membatasi pergerakan masyarakat. Bahkan, sejumlah instansi di lingkungan pemerintah daerah menerapkan kebijakan tertentu dalam memberikan pelayanan. Apakah ada strategi khusus agar kualitas pelayanan tetap stabil?

-Pembaca Media BPP-

Kemendagri menegaskan jangan sampai pandemi membuat pelayanan kepada publik menjadi menurun. Pemerintah daerah perlu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik kualitas, proses pelayanan, maupun kualitas output pelayanan publik diharapkan tidak berkurang, kalau bisa meningkat walaupun di tengah wabah.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email pid@litbangkemendagri.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 5 NO 4 | JULI-AGUSTUS 2020

DAERAH 36

PROVINSI LAMPUNG DAN JAWATENGGAH PROTOKOL KESEHATAN DI RUANG REKREASI

Dua tempat wisata yang jaraknya terpisah jauh kompak menerapkan protokol kesehatan. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus yang tengah merebak. Roda perekonomian dapat berjalan, tetapi kesehatan juga tetap terjaga. Kedisiplinan pengunjung jadi kunci.



LEBIH DEKAT 40 DARI ISU KEPEMILUAN SAMPAI KETERWAKILAN PEREMPUAN

Bagi **Aditya Perdana (40)** Pemilu adalah hal menarik untuk dikaji karena memiliki banyak aspek. Bersama Puskapol Universitas Indonesia, Bapak dua anak ini fokus mengkaji keterwakilan perempuan dalam panggung politik. Hasil kajiannya dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah. Kini tak sedikit perempuan yang berani unjuk gigi di ranah politik.

JENDELA BPP 6

AKTIVITAS 10

INFOGRAFIS 23

KILAS BERITA 43

SAINS DAN TEKNOLOGI 44

GAYA HIDUP 45

RESENSI BUKU 46

RESENSI FILM 48

SASTRA 50

KOMIK 53

OPINI REKONSTRUKSI HABITUS PILKADA DI TENGAH PANDEMI 54

PROGRAM PEN DAN KEMANDIRIAN PETANI 56

CATATAN 58

LAPORAN UTAMA 16-33

MEMBANGUN SISTEM PENDATAAN SKALA BESAR

BEBERAPA LEMBAGA PEMERINTAH MULAI MENGEMBANGKAN BIG DATA, SEIRING DENGAN BERALIHNYA TEKNOLOGI ANALOG KE DIGITAL, TAK TERKECUALI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.



Sistem dan Proses Penyelenggaraan Pilkada Perlu Dievaluasi

Presiden Institut Otonomi Daerah (i-Otda) Prof Djohermansyah Djohan mengatakan, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu dievaluasi. Evaluasi dibutuhkan untuk menghasilkan jalannya pilkada yang lebih baik. “Kita kaji di otonomi daerah biasa bagaimana, di daerah otonomi khusus bagaimana. Kita cari kebaikan-kebaikannya lalu kita kembangkan model pilkada yang lebih berkualitas,” ujar Prof Djohermansyah saat mengikuti rapat virtual bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, beberapa waktu lalu.

Pilkada, katanya, mesti dilakukan dengan karakter Indonesia. Parameter sistem pilkada yang sesuai dengan karakter Indonesia yakni, harus berdasarkan Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, menghormati kekhususan dan keistimewaan daerah, biaya yang murah, bebas dari kecurangan, menghasilkan pemimpin yang baik, serta terwujudnya pemerintah daerah yang efektif.

Ia juga menjelaskan sejumlah isu terkait pilkada di Indonesia, yang secara garis besar tercakup dalam tiga tahap, yakni saat masa persiapan pilkada, masa penyelenggaraan pilkada, dan pasca pilkada. Ketiga tahapan tersebut memiliki persoalannya masing-masing dan perlu segera dibenahi. “Ini adalah salah satu upaya perbaikan mengevaluasi pilkada,” ujarnya.

Selain Prof Djohermansyah, terhubung pula Prof Siti Zuhro dan Prof Satya Arinanto. Senada dengan Prof Djohermansyah, Prof Siti Zuhro mengatakan

evaluasi jalannya pilkada penting dilakukan. Sebab, menurutnya 15 tahun melaksanakan pilkada berlangsung diakui belum memberikan dampak yang signifikan. Kompetisi yang selama ini berjalan belum terkelola dengan baik dan belum terbangunnya rasa tanggung jawab. Karenanya, pasca pilkada kompetisi masih terasa, sehingga kepala daerah yang telah dilantik tidak fokus mengemban jabatannya.

Di samping itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila kerap terabaikan karena menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, evaluasi ini diharapkan dapat mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berkeadilan. Ia juga sepakat, jika pilkada di Indonesia harus dijalankan dengan melihat karakter masing-masing daerah. “Ini harus ditopang dengan budaya-budaya kita agar tidak tercerabut,” ujarnya.

Pilkada jangan diundur

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Satya Arinanto, menyarankan agar pelaksanaan pilkada 2020 jangan sampai diundur lagi. Menurutnya penundaan itu akan berdampak pada banyaknya pejabat yang bakal diangkat sebagai pelaksana tugas kepala daerah. Dengan kondisi itu, ia mempertanyakan efektivitas jalannya pemerintahan. “Jumlahnya (pelaksana tugas) mungkin hampir sama dengan seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya saat mengikuti rapat virtual dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Rabu (5/8/2020).

Selain menyoroti jadwal pilkada, Prof Satya juga mengimbau agar segera



membentuk pengadilan khusus pemilu. Sebab, pembentukan itu sudah diamanatkan dalam UU. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri, katanya, sudah menyatakan bahwa dirinya tidak berhak mengadili sengketa pemilu. Namun, karena lembaga khusus pengadilan pemilu belum terbentuk, maka sengketa itu ditangani oleh MK. “Saya sendiri tahun 2000-an sudah menulis perlunya pengadilan pemilu,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Siti Zuhro, penelitian terkait Pilkada sangat penting dilakukan untuk mendorong keberhasilan pilkada. Namun sayangnya, kegiatan penelitian yang dilakukan umumnya di Badan Litbang sering kali terkendala masalah anggaran. Menurutnya, kegiatan penelitian tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil. “Sebab, untuk menghasilkan kajian yang berkualitas dibutuhkan sejumlah tahapan, seperti mengunjunggi lokus, penggalan data, mengolah

data, dan sejumlah tahapan lainnya,” demikian ungkap Prof Siti Zuhro.

Dengan anggaran yang terbatas, lanjutnya, maka hasil kajian pun menjadi tidak maksimal. Prof Siti Zuhro menceritakan pengalamannya selama melakukan kajian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia mengatakan lembaga tersebut menyediakan anggaran yang memadai sehingga hasilnya pun komprehensif. “Terus terang peneliti tidak bisa bergerak banyak, jika

tidak didukung anggaran yang memadai,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengamini jika kegiatan kelitbang harus mendapat dukungan anggaran. Supaya kajian yang dilakukan dapat melahirkan hasil yang berkualitas. Terlebih hasil kelitbang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang berbasis riset.

■ MUJAENI

Ajang KDI berikan Penghargaan Kepada 18 Kepala Daerah

JAKARTA-Koran Sindo dan sindonews.com memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang melakukan inovasi dan terobosan dalam membangun daerahnya. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini ajang yang diberi nama Kepala Daerah Inovatif (KDI) digelar secara virtual melalui channel YouTube sindonews, Rabu (23/8/2020).

Gelaran KDI secara virtual ini akibat adanya pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan fisik sebagai upaya pencegahan penularan. Pada KDI 2020, Koran Sindo dan sindonews.com memberikan apresiasi kepada 18 kepala daerah, yang terdiri dari 3 gubernur, 11 bupati, dan 4 wali kota.

Gelaran tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Tjahjo Kumolo, dan Pemimpin Redaksi Koran Sindo dan sindonews.com Djaka Susila.

Mengambil tema “Bangkit dari Pandemi”, KDI tahun ini berupaya menyoroti peran kepala daerah dalam mengatasi bencana tersebut. Ada empat kategori penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah, yakni ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan tata kelola pemerintahan.

Djaka Susila mengatakan, inovasi harus menjadi napas bagi semua organisasi termasuk pemerintahan. Apalagi saat terjadi krisis seperti sekarang, inovasi mesti semakin dipacu. “Ketika pandemi seperti ini harus digandakan

(inovasinya),” tutur Djaka Susila.

Djaka menambahkan, supaya mampu terbebas dari pandemi yang melanda, tentu dibutuhkan upaya yang luar biasa. Menurutnya, organisasi pemerintah sebagai tulang punggung bangsa Indonesia telah berupaya untuk bisa keluar dari jeratan pandemi tersebut. “Pemerintah daerah menjadi garda terdepan dari pemerintahan saat ini untuk bisa bangkit dari pandemi,” kata Djaka Susila.

Inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah harus disebarkan secara luas agar menjadi inspirasi banyak pihak. Pemberiaan apresiasi ini diharapkan dapat menjadikan kepala daerah semakin percaya diri dalam berinovasi. Apresiasi ini juga diharapkan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perubahan, terutama di masa pandemi.

Dalam kegiatan itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni. Mendagri mengapresiasi gelaran tersebut karena merupakan bentuk keharmonisan dan sinergitas antara pemerintah dengan pers.

Mendagri mengatakan, saat ini dunia tengah berjibaku mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Momentum ini, kata Mendagri, memberikan peluang untuk melakukan penanganan melalui inovasi dan karya nyata. “Sehingga dapat meningkatkan daya



saing dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Presiden, tutur Mendagri, mengatakan jika tidak ada negara yang benar-benar siap mengatasi pandemi Covid-19. Namun, Presiden yakin pandemi ini menjadi momentum melakukan reformasi dan inovasi.

Dalam hal penanganan Covid-19, pemerintah daerah didorong untuk mampu terus berinovasi dengan memanfaatkan potensi unggulan yang dimiliki. Guna mendukung itu, belum lama ini Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar lomba inovasi daerah dalam menyiapkan tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19. “Diharapkan inovasi tersebut dapat menjadi model yang dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain serta

kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dan berinovasi,” tutur Mendagri.

Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, penilaian KDI dilakukan secara selektif dan transparan oleh sebuah tim yang independen. Dirinya berharap gelaran tersebut dapat merangsang kepala daerah untuk terus berinovasi. “Mudah-mudahan akan menghasilkan daerah-daerah yang mempunyai integritas dan berprestasi,” harap Tjahjo.

Di ujung acara, 18 kepala daerah yang terhubung secara virtual diberikan penghargaan secara simbolis. Mendagri yang diwakili Kepala Badan Litbang diberikan kehormatan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah pemenang untuk kategori ekonomi.

Kepala daerah jangan takut berinovasi

Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta agar kepala daerah tidak ragu dan takut dalam mengambil kebijakan, termasuk melakukan inovasi. Sebab, hal itu telah dijamin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam aturan itu disebutkan, bahwa kebijakan tidak dapat dipidanakan karena merupakan hak diskresi kepala daerah. “Kepala daerah tidak ragu dan tidak takut berinovasi dalam mengelola potensi yang dimiliki serta jeli dalam mengkaji dan menerapkan peraturan yang berlaku,” tutur Mendagri.

Mendagri menambahkan, sejalan dengan amanat UU Nomor 30 Tahun

2014 tersebut, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan sekaligus mengingatkan kepada kejaksaan dan kepolisian. Ada lima instruksi yang disampaikan oleh Presiden. Pertama, kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga sama tidak bisa dipidanakan. Polisi dan kejaksaan harus bisa membedakan tindakan yang betul-betul pidana. Ketiga, penegak hukum harus cermat menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal potensi kerugian negara. Keempat, kerugian negara yang bisa dipidanakan harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, tidak diekspose ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan.

■ MUJAEANI

Bangun Komunikasi dengan Sejumlah Lembaga Donor



JAKARTA-Guna memperkuat fungsi kelembagaan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri membangun komunikasi dengan lembaga donor Ford Foundation dan Plan C, Kamis (6/8/2020). Komunikasi ini untuk membangun kerja sama dengan kedua lembaga tersebut agar mendukung program strategis Badan Litbang Kemendagri.

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, menyebutkan sejumlah kegiatan strategis yang tengah dilakukan Badan Litbang Kemendagri. Salah satu kegiatannya, yakni melakukan kajian evaluasi terhadap jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia menjelaskan, kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga *think tank* independen, perguruan tinggi, dan sejumlah pakar. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan re-

komendasi pembenahan pilkada yang lebih baik. “Diharapkan kerja sama semacam ini semakin banyak, sehingga mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi,” ujar Fatoni.

Selain itu, lanjut Fatoni, Badan Litbang Kemendagri juga tengah mendorong pengembangan *smart city*. Upaya ini telah dikomunikasikan dengan komponen Kemendagri terkait. “Kita akan mengambil sisi yang berbeda dari pengembangan konsep *smart city*,” ujarnya. Sejumlah program dan rencana strategis lainnya juga turut disebutkan Fatoni.

Fatoni berharap, Ford Foundation berkenan bekerja sama dengan Badan Litbang Kemendagri untuk mendukung sejumlah program strategis. Pihaknya siap untuk mengikuti berbagai persyaratan kerja sama. Ia mengatakan, saat ini Badan Litbang memang

diberi beragam tugas oleh Menteri Dalam Negeri yang perlu dukungan dari berbagai pihak. Terlebih dengan adanya pandemi, sejumlah anggaran mengalami realokasi.

Sementara itu, Alexander Irwan Direktur Ford Foundation Indonesia menyambut baik inisiasi yang dibangun oleh Badan Litbang Kemendagri. Pihaknya bakal mempelajari lebih lanjut program strategis Badan Litbang yang dapat dilakukan kerja sama. Dirinya mengaku program yang diemban Ford Foundation tahun ini tak sebanyak dari tahun sebelumnya. “Kami akan mempelajari, pasti kami ingin ada diskusi lanjutan dengan Bapak Kaban. Sehingga dengan keterbatasan ini, kami bisa menemukan fungsi strategis mana yang bisa dibantu oleh Ford Foundation,” kata Alex.

■ MUJAENI

Kemendagri Kunjungi Banyuwangi untuk Tinjau Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru



BANYUWANGI- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunjungi Kabupaten Banyuwangi untuk melihat penerapan adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman Covid-19 di daerah tersebut. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berhasil meraih penghargaan di sejumlah sektor, pada ajang Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang belum lama ini digelar Kemendagri.

Kedatangan Kemendagri diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) Agus Fatoni, yang juga ketua panitia dari lomba tersebut. Kedatangan Fatoni disambut oleh Bupati Banyuwangi, Azwar Anas.

Fatoni menjelaskan, kedatangannya untuk meninjau apakah adaptasi kebiasaan baru yang dilombakan sudah benar-benar diterapkan atau belum. “Kedatangan kami dalam rangka meninjau tatanan normal baru yang kemarin dilombakan,” ujar Fatoni, Jumat (7/8/2020).

Selain mengecek penerapannya, Kemendagri juga ingin mempublikasikannya ke masyarakat luas. Publikasi ini bertujuan agar masyarakat dan daerah lain dapat memahami sekaligus meniru adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman Covid-19. Fatoni menyebutkan, untuk menyebarkan tatanan tersebut, Kemendagri telah menggandeng tim Youtuber dengan nama akun Tina Bule. “Selain memperkenalkan penerapan normal baru, ini juga sebagai

ajang promosi agar lebih dikenal secara luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Fatoni juga mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang dilakukan, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan saban tahunnya.

Sementara itu, Azwar Anas menyebutkan sejumlah adaptasi kebiasaan baru yang telah diterapkan terutama di sektor pariwisata. Ia juga menjelaskan prestasi dan capaian dalam mengelola destinasi wisata. Upaya yang dilakukannya diakui membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah kunjungan yang meningkat pesat mencapai 979 persen untuk wisatawan domestik, dan 712 persen untuk wisatawan asing.

Berkat beragam strategi yang dilakukan, saat ini pendapatan per kapita juga turut meningkat sebesar Rp 51,80 Juta atau sebesar 148 persen. “Angka tersebut menempatkan Banyuwangi sebagai daerah yang pendapatan per kapitanya terbesar se-Jawa Timur pada 2019,” tutur Anas.

Berbagai upaya lain untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya yaitu melarang pembangunan hotel melati. Kebijakan ini untuk mendukung usaha *homestay* yang dibangun masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat.

■ MUJAENI

Pengendalian Mutu Kelitbangan Inovasi Daerah, KPK Gelar Diskusi Bersama Badan Litbang Kemendagri

JAKARTA – Dalam rangka pengendalian mutu kelitbangan inovasi daerah, Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi bersama BPP Kemendagri. Diskusi difokuskan terkait kebijakan atau program Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi khusus dan pariwisata. Diskusi dilaksanakan di Aula Badan Litbang Kemendagri, Jumat (7/8) melalui aplikasi Zoom. Dalam diskusi tersebut KPK mempertanyakan beberapa hal terkait lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

KPK di antaranya mempertanyakan gagasan awal, kriteria, serta alasan suatu daerah mendapatkan DID tersebut. Terkait hal itu, Sekretaris Badan Litbang Kemendagri saat itu, Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sering diutarakan oleh beberapa media kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Maurits, kegiatan tersebut adalah kesepakatan bersama yang disaksikan beberapa menteri saat Menteri Dalam Negeri menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan inovasi dan protokol kesehatan terkait Covid-19 di daerah. Selain itu, Maurits menegaskan, lomba tersebut bukanlah lomba video, melainkan lomba inovasi daerah berkaitan dengan tatanan normal baru di 7 sektor yakni pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik, dan PTSP.

“Sekali lagi kami menjelaskan pada dasarnya ini adalah lomba inovasi



daerah terkait kesiapan pemerintah daerah dalam penyiapan tatanan normal baru, produktif, dan aman Covid 19,” tegasnya.

Pihak KPK juga mempertanyakan apakah lomba video tersebut mempertimbangkan beberapa hal seperti jumlah kasus dan logistik di daerah. KPK khususnya mempertanyakan terkait Kabupaten Seram Bagian Barat yang menang di semua sektor. Dan jika dijumlahkan total hadiah yang mereka terima sebesar 15 M. Padahal, Seram Bagian Barat pada saat itu hanya memiliki 3 kasus positif Covid-19.

Terkait hal tersebut Maurits beralasan, karena fokus lomba terkait inovasi daerah, maka beberapa kriteria tersebut belum termasuk ke dalam kriteria penilaian. Menurutnya, hal tersebut menjadi masukan, agar lomba selanjutnya bisa memasukkan kriteria tersebut. Namun, menurutnya lomba tersebut memiliki tujuan yang baik, agar pemerintah daerah bergerak cepat melakukan persiapan protokol kesehatan di berbagai sektor. Maurits juga menjawab alasan Kabupaten Seram Bagian Barat mendominasi pemenang perlombaan.

“Seram Bagian Barat adalah salah satu kabupaten daerah tertinggal, dan masuk dalam klaster tersebut. Adapun sejauh ini, daerah tertinggal yang mengirimkan video di semua sektor sangat minim, sehingga Seram Bagian Barat memiliki peluang yang besar untuk memenangkan lomba tersebut,” jawabnya melalui aplikasi Zoom.

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana dalam acara tersebut mengapresiasi acara yang diselenggarakan Kemendagri. Menurutnya kegiatan tersebut dalam rangka memberikan stimulus kepada pemerintah daerah dalam upaya penanganan Covid-19.

“Secara pribadi apresiasi patut diberikan kepada Kemendagri dalam rangka mendorong stimulus penanganan Covid-19 di daerah. Kemendagri selanjutnya perlu mendorong daerah agar segera membuat laporan rencana penganggaran DID tambahan agar DID-nya segera dicairkan. Karena sebagaimana kita tahu jumlah DID yang dialokasikan sebesar Rp 5 triliun untuk penanganan Covid-19,” katanya.

■ SAIDI RIFKI

Badan Litbang Kemendagri Dorong Upaya Peningkatan Kapasitas Peneliti

JAKARTA-Peneliti merupakan ujung tombak bagi keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Karenanya, peningkatan kapasitasnya perlu diperhatikan, agar menghasilkan kinerja yang maksimal. Merespons kebutuhan tersebut, Badan Litbang Kemendagri menggelar Forum Diskusi Selasa bertajuk “Penguatan Kapasitas Pejabat Fungsional Peneliti”, Selasa (18/8/2020).

Kegiatan yang digelar secara virtual ini melibatkan peneliti dari Badan Litbang Kemendagri dan Badan Litbang maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kelitbangan, baik di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara narasumber yang hadir

yakni Gono Semiadi yang merupakan Ketua Majelis Asesor Peneliti Pusat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan, Forum Diskusi Selasa atau disingkat Fordisel, merupakan wadah untuk mendiskusikan berbagai upaya peningkatan kapasitas Badan Litbang dari berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. “Penguatan kapasitas peneliti perlu kita lakukan karena tantangan yang akan datang membutuhkan kemampuan yang semakin baik,” ujar Fatoni saat membuka kegiatan tersebut.

Fatoni menambahkan, peningkatan kapasitas dibutuhkan karena menyadari secara kuantitas jumlah peneliti masih belum mencukupi kebutuhan. Di sisi lain, secara kualitas masih banyak hal yang dapat terus ditingkatkan. “Khususnya di lingkungan pemerintah daerah dan Kemendagri, dalam rangka mendorong kinerja,” tuturnya.

Fordisel rencananya bakal menjadi kegiatan rutin Badan Litbang Kemendagri. Selain kegiatan tersebut, Badan Litbang Kemendagri juga menggelar webinar rutin setiap Rabu. Fatoni menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Litbang agar semakin berkualitas.

■ MUJAENI



Badan Litbang Kemendagri Dorong Peningkatan Pengelolaan Publikasi Ilmiah

JAKARTA - Keberadaan publikasi ilmiah yang berkualitas menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Melalui publikasi ini, berbagai hasil kelitbangan dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga kemanafaatannya lebih maksimal. Di sisi lain, keberadaannya menjadi tolok ukur produktivitas kegiatan kelitbangan. Publikasi ilmiah ini juga berperan untuk mendukung karier jabatan fungsional, baik dosen, peneliti, maupun akademisi. Di tingkat Asia, pada 2019 Indonesia sendiri mampu menempati urutan ke-5 sebagai negara penghasil publikasi ilmiah terbanyak.

Sebagai salah satu unit kerja yang membina jabatan fungsional peneliti di Kemendagri dan pemerintah daerah, Badan Litbang Kemendagri memiliki perhatian terhadap keberadaan publikasi ilmiah, salah satunya melalui jurnal elektronik. Badan Litbang Kemendagri mencatat, pada Agustus 2020 ada sebanyak 385 peneliti yang tersebar di Badan Litbang Kemendagri dan pemerintah daerah. Jumlah tersebut mesti ditopang dengan keberadaan publikasi ilmiah yang andal baik secara kuantitas maupun kualitas. Meski tak sedikit pemerintah daerah memiliki jurnal ilmiah, tetapi di sejumlah aspek kondisinya masih perlu ditingkatkan.

Menyadari pentingnya keberadaan publikasi ilmiah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) menggelar diskusi bertajuk “Strategi Peningkatan Publikasi dan Tata Kelola Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Kinerja Peneliti”, Rabu (19/8/2020). Kegiatan yang digelar secara virtual ini, menghadirkan narasumber Direktur Kekayaan Intelektual Kemenristek/BRIN, Heri Hermansyaah. Para peserta yang tergabung terdiri dari peneliti, akademisi, dan masyarakat umum dari berbagai daerah.

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni menuturkan, saat ini Badan Litbang Kemendagri memiliki dua jurnal elektronik yang terakreditasi *Science and Technology Index* (Sinta). Sebagai salah satu komponen Kemendagri, Badan Litbang juga melakukan pembinaan kepada daerah termasuk dalam pengelolaan jurnal ilmiah.



Fatoni berharap, kegiatan diskusi tersebut menjadi wadah komunikasi dan berbagi pengalaman antar pengelola jurnal di seluruh Indonesia. “Mari bersama berkolaborasi dalam mewujudkan jurnal ilmiah yang berkualitas sebagai wahana komunikasi ilmiah di antara peneliti, akademisi, dan masyarakat pengguna untuk mencapai sasaran, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan dan

memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

Akreditasi jurnal

Pengelolaan jurnal ilmiah yang andal tidak terlepas dari capaian akreditasinya. Saat ini akreditasi tersebut berada di bawah pengelolaan Kemenristek/BRIN melalui pengindeks Sinta. Heri menjelaskan, bagaimana proses akreditasi itu dilakukan.

Ia menyebutkan, ada delapan aspek yang perlu diperhatikan bagi pengelola jurnal yang hendak mengajukan akreditasi. Pertama, jurnal tersebut diharuskan memiliki *Electronic International Standard Serial Number* (E-ISSN). Kedua, memiliki pengenal objek digital (DOI). Ketiga, jurnal harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau telaahan, mengandung temuan, pemikiran orisinal, serta tidak plagiat.

Keempat, jurnal minimal diterbitkan dua tahun secara berurutan terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Kelima, setiap tahunnya jurnal terbit paling sedikit sebanyak dua kali. Keenam, setiap tahun paling sedikit jurnal terbit sebanyak dua kali. Ketujuh, masing-masing terbitan paling tidak memuat lima artikel. Kedelapan, jurnal yang hendak diakreditasi mesti memiliki profil di *Google Scholar*. “Apabila persyaratannya belum lengkap, maka akan dikembalikan ke pengelola jurnal untuk dilengkapi,” ujarnya.

Para peserta terlihat antusias mengikuti diskusi tersebut. Berbagai pertanyaan mengalir dari berbagai peserta. Bahkan, wacana peningkatan kerja sama pun sempat mencuat.

■ MUJAENI

Kepala Badan Litbang Kemendagri Jadi Pembicara Kunci pada Diskusi Pengelolaan Ruang Laut



JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni, menjadi pembicara kunci pada diskusi bertajuk “Pengelolaan Ruang Laut Kewenangan Provinsi: Pemanfaatan dan Pengaturannya”, Rabu (26/8/2020). Diskusi ini terselenggara atas kerja sama Badan Litbang Kemendagri dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).

Fatoni menjelaskan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan tingkat pemerintahannya. Urusan dan kewenangan tersebut meliputi absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan di bidang kelautan dan perikanan merupakan urusan yang masuk dalam kewenangan konkuren. Urusan ini bersifat pilihan yang dapat dilakukan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. “Ini merupakan ruang yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ujar Fatoni.

Fatoni menyebutkan sejumlah sub urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan. Urusan tersebut meliputi kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; perikanan tangkap; perikanan budidaya; pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan; pengolahan dan pemasaran; karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; pengembangan sumber daya manusia masyarakat perikanan dan kelautan.

Fatoni menambahkan, pelaksanaan di sektor kelautan dan perikanan lebih difokuskan pada provinsi selaku koordinator kabupaten/kota. Karenanya, inovasi di bidang tersebut agar dilakukan secara kolaboratif. “Karena kolaborasi merupakan syarat utama dalam melakukan inovasi,” tuturnya.

Selain Fatoni, kegiatan ini juga menghadirkan pembicara lain yakni, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aryo Anggono, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IKINDO Peter Frans, Ketua Pokja Inovasi kebijakan, Son Diamar, Pengamat sekaligus Pemahat Transportasi Laut & Logistik Maritim Harry Budiarto. Diskusi ini dimoderatori oleh Dewan Pengurus Nasional IKINDO Ronald Sihombing Hutasoit dan Peneliti Madya Badan Litbang Kemendagri Herie Saksano. Para peserta pada diskusi ini berasal dari pemerintah daerah dan anggota IKINDO seluruh Indonesia.

■ MUJAENI

MEMBANGUN SISTEM PENDATAAN SKALA BESAR

BEBERAPA LEMBAGA PEMERINTAH MULAI MENGEMBANGKAN *BIG DATA*, SEIRING DENGAN BERALIHNYA TEKNOLOGI ANALOG KE DIGITAL, TAK TERKECUALI KEMENTERIAN DALAM NEGERI. PEMBANGUNAN SISTEM PENDATAAN SKALA BESAR JUGA MULAI DIGALAKAN MELALUI BEBERAPA INDEKS SEPERTI INDEKS INOVASI DAERAH, INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH YANG DIHIMPUN BADAN LITBANG KEMENDAGRI. DATA TERSEBUT BERGUNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SEKTOR INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK, STABILITAS SISTEM KEUANGAN, DAN MENGUKUR KINERJA KEPALA DAERAH. MONETISASI MAHA DATA (*BIG DATA*) MENJADI PENTING AGAR KEBIJAKAN YANG DILAHIRKAN TAK LAGI BERDASARKAN INTUISI.





GENJOT INOVASI MELALUI INDEKS INOVASI

Badan Litbang Kemendagri berupaya meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mengisi data indeks inovasi daerah. Melalui indeks, Badan Litbang Kemendagri mampu memetakan kondisi daerah dan melakukan pembinaan terhadapnya. Ikhtiar ini sebagai bentuk komitmen di tengah posisi Indonesia dalam hal inovasi dan daya saingnya yang masih perlu ditingkatkan.

Isman, Kepala Subbidang Standar Kompetensi Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri tengah membuka sistem indeks inovasi daerah melalui komputer di atas meja kerjanya, Senin (20/7/2020). Usai masuk ke dalam sistem dengan akun dan *password* yang dimiliki, ia lantas menunjukkan sejumlah data pemerintah daerah yang sudah dan belum mengunggah bukti inovasi ke dalam sistem tersebut. Melalui akunnya, ia juga dapat melihat seberapa banyak daerah yang telah mengunjungi sistem indeks inovasi daerah saban harinya, entah untuk sekadar melihat, atau memasukkan data indeks.

Isman memang sering memantau perkembangan pengisian indeks inovasi daerah. Hal ini berkaitan dengan sudah dimulainya pengisian indeks inovasi daerah untuk tahun ini pada akhir Mei 2020 lalu oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni. Mendagri telah mengimbau kepada daerah agar aktif mengisi data indeks inovasi

daerah. Data tersebut menjadi dasar dari penilaian daerah berinovasi, yang akan diberi penghargaan pada ajang Innovative Government Award (IGA). Ajang tersebut digelar Kemendagri melalui Badan Litbang saban tahunnya.

Isman mengatakan, data yang terunggah ke dalam sistem bakal dipantau dan diverifikasi kebenarannya. Saat ini Puslitbang Inovasi Daerah membentuk tim untuk melakukan verifikasi tersebut. Sebanyak empat tim besar yang menangani sejumlah wilayah di Indonesia. Masing-masing tim dikomandoi oleh seorang koordinator yang dibantu dengan sejumlah anggota. Menurut Surat Keputusan bernomor 0026/362/Pusida, koordinator memiliki beberapa tugas di antaranya meliputi; 1). membagi tugas anggota per provinsi, kabupaten/kota; 2). memantau perkembangan setiap anggota dalam memverifikasi berkas IGA; 3). memantau dan mencari solusi kendala



yang dihadapi; 4). memantau progres pendataan inovasi daerah secara *realtime*; 5). membuat laporan rekapitulasi per hari terkait keikutsertaan peserta indeks inovasi daerah; 6). menjaga kerahasiaan data inovasi daerah.

Sementara itu, untuk tugas anggota meliputi sebagai berikut; 1). membuat rincian inovasi per provinsi, kabupaten/kota; 2). melakukan verifikasi inovasi dilihat dari tahun inovasi dan ketersediaan dokumen pendukung disertai dengan argumentasi penolakan; 3). melaporkan kendala yang dihadapi dalam melakukan verifikasi kepada koordinator; 4). membuat rekapitulasi data inovasi daerah secara *realtime* per provinsi, kabupaten/kota; 5). melaporkan perkembangan inovasi daerah baik provinsi, kabupaten/kota; 6). menjaga kerahasiaan data inovasi daerah. Isman sendiri merupakan salah satu anggota verifikator yang kebagian tugas mengurus wilayah



Pulau Jawa. Namun dalam pelaksanaannya, dirinya mengaku sering membantu menangani wilayah lain.

Ia menjelaskan, untuk pengisian indeks inovasi daerah tahun ini Badan Litbang Kemendagri menerapkan skema baru yang pengisiannya dilakukan secara berjenjang. Pengisian data indeks terlebih dulu dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian disetujui oleh Badan Litbang Daerah atau OPD yang menangani kelitbangannya yang berperan sebagai admin daerah. Perubahan skema ini untuk memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap OPD lain atas inovasi atau data yang dimasukkan ke dalam sistem indeks. Dengan skema ini jejaring inovasi diyakini lebih luas dan bisa mendata rinci inovasi yang dilakukan. “Kemarin yang nginput (data) itu Badan Litbang, sekarang yang nginput itu OPD. Badan Litbang sebagai admin daerah, dia yang akan meng-approve nanti indeks itu untuk dikirim ke Ke-

mendagri,” ujarnya.

Dari data yang diisi tersebut, pemerintah daerah juga bisa menggelar lomba inovasi di tingkat OPD. Lomba ini dapat memanfaatkan capaian pengukuran indeks masing-masing OPD yang telah diunggah ke dalam sistem. Dengan data ini nantinya bakal terlihat OPD mana yang banyak melahirkan inovasi. “Karena nanti hasil pengukuran indeks bisa keluar tuh untuk masing-masing OPD,” tambahnya.

Isman menuturkan, untuk tahun ini indeks inovasi daerah masih menggunakan 35 indikator pengukuran. Hanya saja ada salah satu indikator yang diubah. Indikator yang dimaksud yakni pada poin inovasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator tersebut diubah menjadi dokumen sistem inovasi daerah (SIDA). SIDA menitikberatkan pada peran para pelaku inovasi, seperti *academician, business, government,*

community, founding). Menurut Isman, penggunaan indikator SIDA itu lebih relevan. Inovasi, katanya, tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi dengan sejumlah pihak.

Dari total 35 indikator terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 14 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 21 indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Meski di tengah pandemi yang membatasi pertemuan tatap muka, diakui tidak menjadi kendala dalam pengisian indeks. Kebanyakan komunikasi memang bergeser secara virtual. Isman mengatakan, dengan kondisi ini justru tak sedikit daerah yang berinisiatif menggandeng Badan Litbang Kemendagri untuk menggelar sosialisasi sekaligus bimbingan teknis kepada OPD-nya dalam pengisian indeks. “Kemendagri membuka untuk itu, walaupun sekarang tidak bisa tatap muka, kita akan bimbing daerah itu,” ujarnya.

Ia memperkirakan tahun ini angka partisipasi pemerintah daerah dalam pengisian indeks bakal lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Terlebih, sebelumnya Badan Litbang Kemendagri menggelar lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 sehingga sosialisasi ihwal pengisian indeks juga lebih banyak dipahami oleh pemerintah daerah. Di samping itu, lanjutnya, selama pandemi banyak inovasi yang dilakukan karena tak sedikit persoalan yang dihadapi. Misalnya, di sektor pendidikan yang banyak mengalami



kendala seperti pertemuan tatap muka menjadi terbatas. “Inovasi itu muncul dari persoalan,” ujarnya.

Tahapan penilaian

Pengisian data indeks merupakan tahap awal penilaian atau yang disebut dengan penjarangan inovasi. Data tersebut kemudian dianalisis variabel dan indikator indeks inovasinya secara digitalisasi. Tahapan ini bakal merangking, daerah mana saja yang lolos sebagai nominator penerima penghargaan. Perangkingan berdasarkan pada tingkat pemerintahannya. Dalam merangking provinsi terinovasi misalnya, diurutkan dari lima daerah tertinggi. Sedangkan untuk kabupaten/kota sebanyak 10 daerah, dan kategori daerah tertinggal/perbatasan sebanyak 3 daerah. Penilaian ini memang dilakukan secara elektronik. Dengan sistem ini, diyakini dapat menekan terjadinya praktik korupsi dan subjektivitas tim penilai. Sebab, nilai yang muncul merupakan hasil kerja aplikasi dengan mengacu pada instrumen inovasi yang diunggah daerah.

Tak hanya itu, tahapan penilaian dilanjutkan dengan presentasi oleh kepala daerah yang masuk sebagai nominator di depan tim penilai. Presentasi ini untuk mengukur pemahaman dan komitmen terhadap inovasi yang diterapkan. Isman memastikan, tim penilai yang terlibat merupakan orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Selain dari Badan Litbang Kemendagri, tim penilai juga terdiri dari kementerian/lembaga lainnya yang terkait.

Isman menjelaskan, tim penilai tidak memiliki wewenang menambah skor. Otoritasnya hanya mengurangi skor atau maksimal mempertahankan nilai yang sudah muncul berdasarkan aplikasi indeks inovasi. “Kemungkinan yang diinput itu ternyata enggak ada (instrumen) nilainya nol, tidak bisa menambah nilai, kalau pun ada maksimal nilainya tetap,” katanya.



Usai mendengar paparan dari kepala daerah, Badan Litbang Kemendagri juga melakukan verifikasi di lapangan atas data yang diisi dalam aplikasi indeks inovasi serta instrumen kriteria penilaian. “Verifikasi lapangan bisa dilakukan secara diam-diam, atau secara resmi,” jelasnya. Namun karena saat ini pandemi masih merebak di sejumlah daerah proses verifikasi lapangan bakal melihat kondisi daerah.

Setelah semua tahap penilaian dilakukan, barulah muncul daerah mana saja

yang berhak mendapat penghargaan pada ajang IGA. Para peraih IGA itu akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penghargaan juga diberikan langsung oleh Mendagri. Selain itu, peraih penghargaan itu nantinya bakal diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID). Pemberian DID, untuk memotivasi daerah agar lebih giat dalam membina dan melaksanakan inovasi di daerah masing-masing.

Tingkatkan inovasi

Indeks inovasi daerah yang dibangun Badan Litbang Kemendagri merupakan upaya untuk meningkatkan inovasi dalam negeri melalui pemerintah daerah. Hal ini memang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang gencar menggaungkan pentingnya inovasi. Usai dilantik pada Oktober 2019 lalu, Jokowi menekankan inovasi mestinya tak hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi sebuah laku budaya. Kerja-kerja yang

monoton perlu diubah agar mampu mendobrak rutinitas sehingga menghasilkan kerja maksimal.

Arahan itu sejalan melihat inovasi yang dimiliki Indonesia terbilang masih perlu ditingkatkan. Menurut data *Global Innovation Index*, pada 2019 Indonesia masih berada di peringkat 85 dari 129 negara di dunia. Di regional ASEAN, peringkat Indonesia berada di posisi kedua terendah. Sedangkan untuk daya saing, merujuk pada data *Global Competitiveness*

Index 2019, di tingkat global Indonesia masih bertengger pada angka 50 dari 141 negara. Capaian tersebut masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia yang mampu menempati peringkat ke 27 dan Thailand di posisi 40. Sedangkan Singapura berada di atas puncak menempati urutan pertama.

Selain sebagai alat ukur penilaian daerah berinovasi, pengisian indeks juga berfungsi untuk menuntun pembinaan kepada daerah yang belum



terinovasi. Sebab, indeks ini mampu melihat kondisi daerah di Indonesia, dari yang terinovatif sampai kurang inovatif. Data yang membentuk peta ini juga memudahkan upaya pembinaan kepada daerah sesuai dengan kondisi kekurangannya masing-masing. Pembinaan ini, meliputi bidang umum pemerintahan maupun teknis. Ihwal pembinaan umum pemerintahan akan dilakukan oleh Kemendagri, termasuk yang dikerjakan Badan Litbang. Sementara itu, untuk pembinaan di bidang teknis dapat dijalankan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, menambahkan, pengisian indeks merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pelaporan kepada Mendagri. Mengacu data pengisian indeks inovasi daerah pada 2019, dari seluruh pemerintah daerah baru ada 252 yang mengisi inovasinya ke dalam sistem. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengisi data, menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Sebab, melalui data tersebut bakal diketahui kondisi inovasi di seluruh daerah, dan memudahkan pemerintah pusat melakukan pembinaan. Karenanya, pihaknya terus berupaya meningkatkan partisipasi pemerintah daerah.

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan pemerintah pusat terus mendorong agar pemer-

intah daerah mampu meningkatkan inovasinya. Salah satunya seperti yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri dengan membangun indeks inovasi daerah. Indeks ini bertujuan untuk memacu pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan memanfaatkan data yang jelas. Pengisian indeks, katanya, mudah dilakukan dan dapat diakses oleh semua pemerintah daerah.

Selain itu, Fatoni, menjelaskan sejumlah strategi agar nilai indeks inovasi daerah dapat meningkat dan masuk dalam sepuluh besar. Salah satu strategi yang disebutkan Fatoni, yakni mewajibkan setiap OPD untuk menghasilkan inovasi. Dengan begitu, ekosistem untuk melahirkan inovasi dapat terbangun. "Hal ini penting agar OPD dapat lebih bertanggung jawab melahirkan inovasi," ujarnya.

Strategi lainnya adalah, mengevaluasi terhadap inovasi yang diterapkan. Upaya ini untuk menyelaraskan perubahan dan kebutuhan organisasi maupun masyarakat sehingga inovasi dapat mencapai sasaran. Agar dikenal publik dan mendapat dukungan dari banyak pihak, inovasi juga perlu disosialisasikan secara luas. Upaya ini dapat pula melibatkan figur publik. "Bisa bekerja sama dengan *influencer*, *youtuber*, media massa dalam rangka *marketing* dan *mem-branding* inovasi da-

erah," katanya. Kemendagri, lanjut Fatoni, juga siap untuk membantu menyosialisasikannya.

Guna mendukung semangat berinovasi, lanjut Fatoni, para inventor juga perlu diberikan penghargaan. Dengan demikian, aparatur sipil negara, OPD, maupun pihak terkait dapat terpacu untuk menghasilkan inovasi.

Fatoni menambahkan, hal lain yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan proyek perubahan dari peserta pendidikan dan pelatihan jabatan, baik eselon II, III, maupun IV. Proyek perubahan itu berisi beragam inovasi yang dapat diterapkan dan memberikan banyak manfaat. Namun sayangnya, proyek perubahan tersebut kerap tidak diaplikasikan di lapangan. "Oleh karena itu, apabila ada peserta diklat, kemudian membuat proper agar wajib dilaksanakan, dimonitor, kemudian dievaluasi," ujarnya.

Di samping itu, untuk menciptakan inovasi, perlu adanya perbaikan manajemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbang. Manajemen tersebut dapat membentuk cara pandang bagi setiap pegawai untuk berpikir inovatif dalam memecahkan setiap persoalan. "Budaya ini penting dan diterapkan pada semua sektor dan aparatur sipil negara," tutur Fatoni.

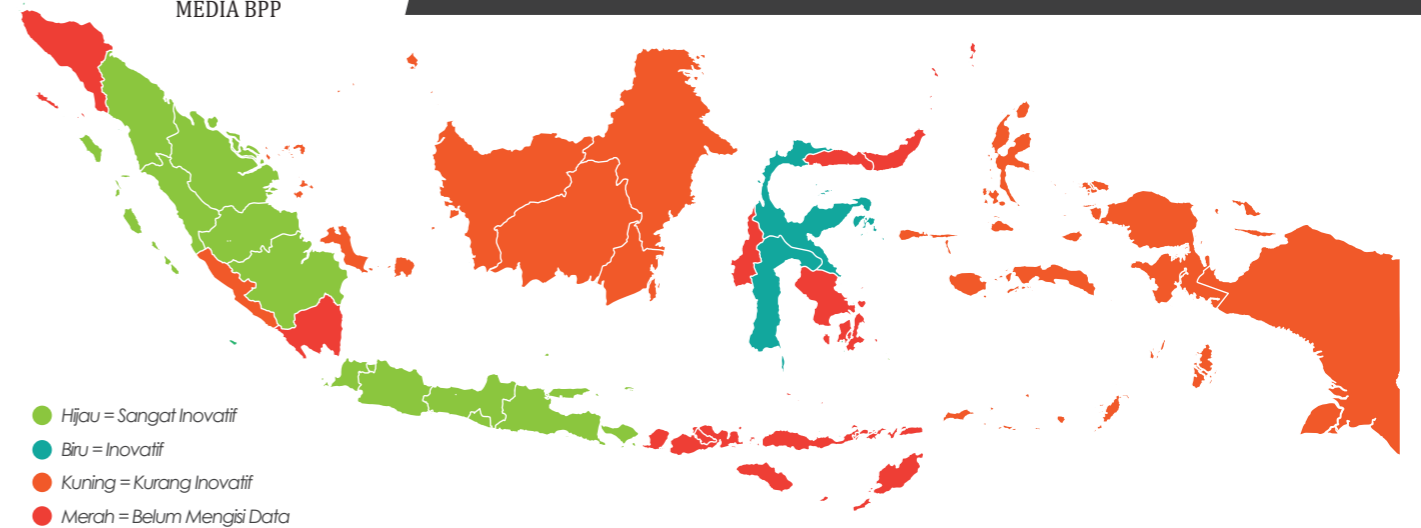
■ MUJAEANI



Infografis

MEDIA BPP

PETA PEMBINAAN PROVINSI BERDASARKAN HASIL INPUT INDEKS INOVASI DAERAH

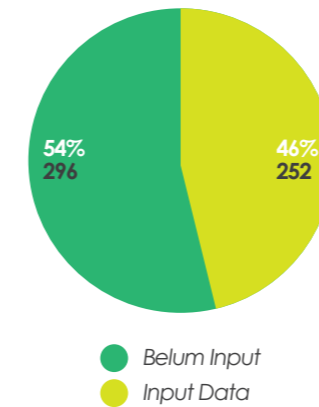


- Hijau = Sangat Inovatif
- Biru = Inovatif
- Kuning = Kurang Inovatif
- Merah = Belum Mengisi Data

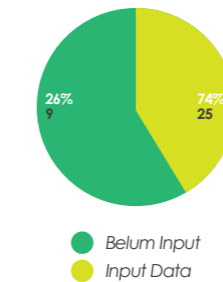
KONDISI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2019

TOTAL 252 PEMERINTAH DAERAH YANG MENGINPUT INOVASI (dari 542 Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia) DKI Jakarta dihitung 1 Provinsi, tidak dijabarkan wilayah administratifnya.

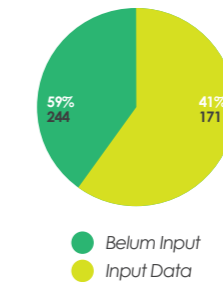
TOTAL



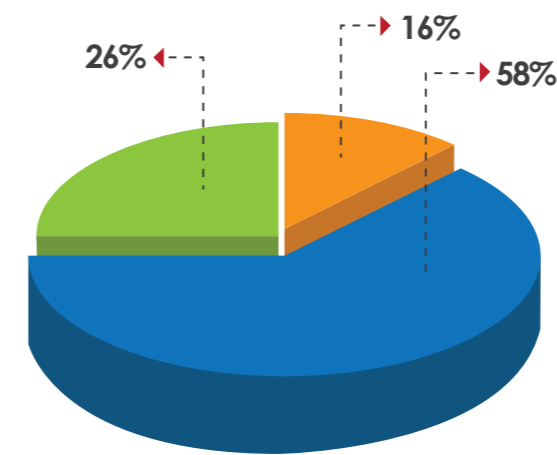
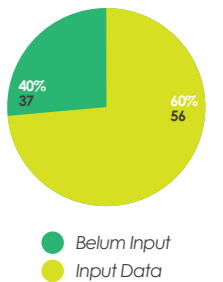
PROVINSI



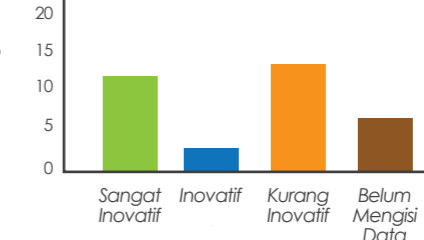
KABUPATEN



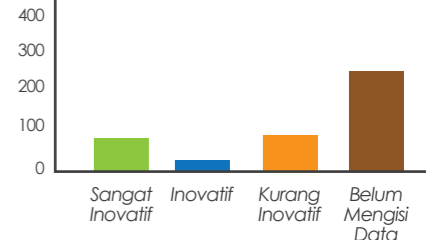
KOTA



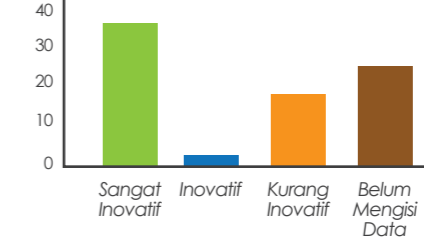
PEMERINTAH PROVINSI



PEMERINTAH KABUPATEN



PEMERINTAH KOTA



INFOGRAFIK/FAJAR HARAMUKTI



IPKD DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERKUALITAS

Badan Litbang Kemendagri membangun indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD). Indeks ini mengukur kualitas pengelolaan keuangan dengan sejumlah dimensi. Payung hukum berupa Permendagri yang mengatur urusan ini telah terbit. Melalui upaya ini diharapkan dapat membangun pengelolaan keuangan daerah yang objektif dan andal.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mesti selaras dengan tema serta agenda pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang ampuh dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Adapun pengelolaan keuangan yang dimaksud, yakni meliputi seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mampu mendapatkan sumber keuangan, di antaranya berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat, pemungutan dan pendayagunaan pajak, retribusi daerah, pendapatan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, serta dana perimbangan dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan dalam kerangka pembangunan daerah bukan tanpa persoalan. Sejumlah permasalahan masih dihadapi, seperti pelaksanaan program pembangunan daerah yang belum memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal itu terutama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, dalam konteks pengelolaan keuangan juga belum menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini terbukti dengan masih maraknya penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pemborosan anggaran, korupsi penggunaan hibah dan bantuan sosial. Masalah juga menghinggapai urusan lainnya, seperti pengadaan barang dan jasa, rendahnya kualitas pelayanan publik, hambatan birokrasi dan perilaku pejabat, serta aparat pemerintah daerah yang belum bebas



LAPORAN UTAMA

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berangkat dari persoalan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) mengembangkan instrumen indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD). Upaya ini untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif, ihwal keberhasilan pengelolaan keuangan yang dilakukan daerah. Belum lama ini, payung hukum IPKD juga telah terbit. Kebijakan tersebut diatur dalam



Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan terbitnya Permendagri ini, Badan Litbang Kemendagri melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah berikhtiar membina pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya. Selama ini, regulasi yang menga-

tur secara jelas indikator pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah dianggap masih belum tersedia.

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah saat itu, Horas Maurits Panjaitan menjelaskan, IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

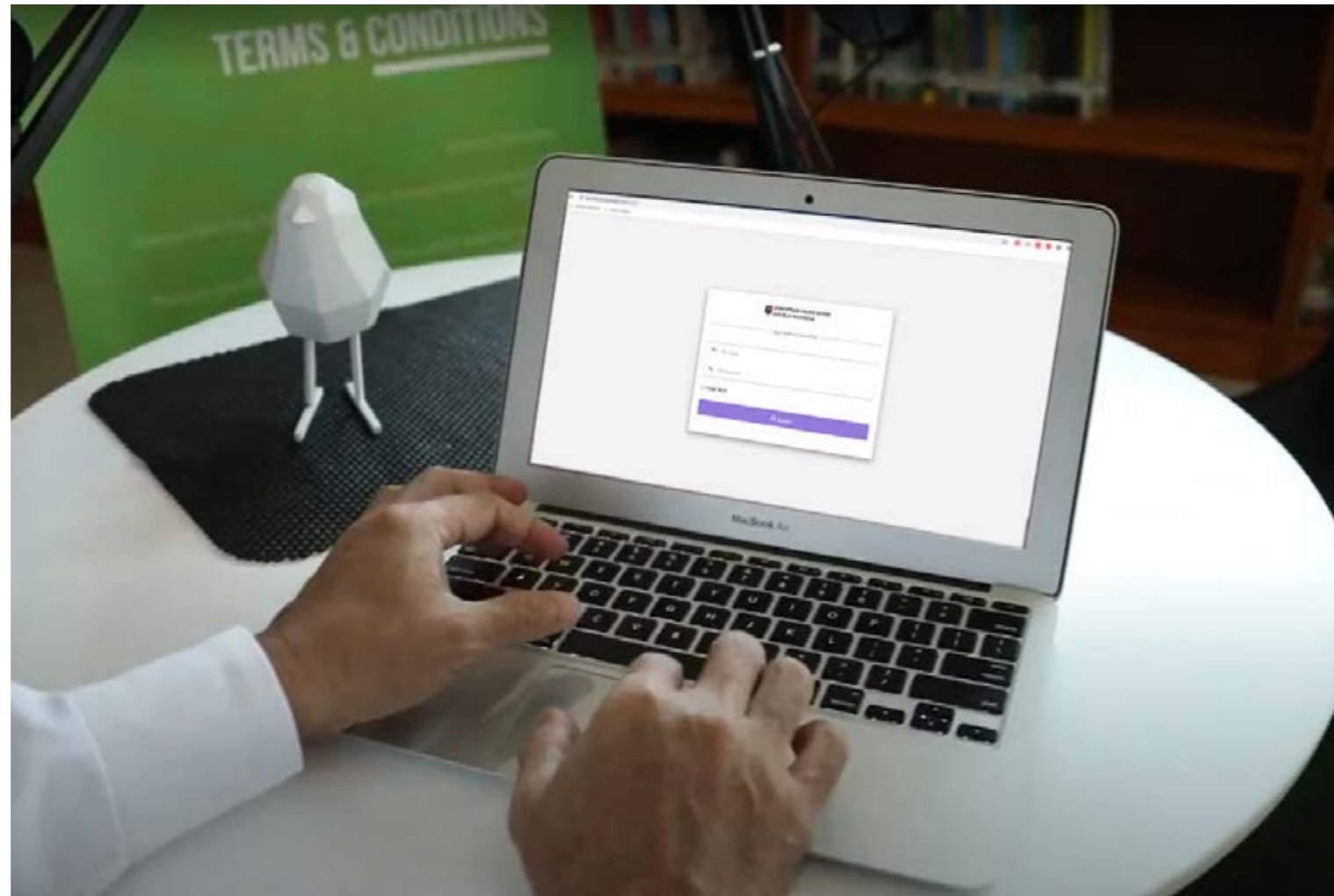


Ada enam dimensi dalam pengukuran tersebut, yaitu (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPd dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPd dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Maurits menambahkan, melalui kegiatan ini Badan Litbang ingin mencapai sejumlah tujuan. Pertama, mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Kedua, memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Keempat, memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki IPKD dengan predikat terbaik secara nasional. Kelima, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Maurits menuturkan, dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, Kemendagri akan segera melakukan



sosialisasi kepada pemerintah daerah. Sosialisasi bakal dilakukan secara virtual, mengingat saat ini situasi masih dalam suasana pandemi. Sosialisasi penting dilakukan agar pemerintah daerah paham dan mendukung pengukuran IPKD. Dengan begitu, ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang objektif dan andal dapat terbangun. "Di samping membangun ekosistem, hal ini agar daerah secara kompetitif meningkatkan kinerja tata kelola keuangannya, sosialisasi itu agar provinsi bisa menilai kabupaten atau kotanya dalam konteks pembinaan," ujar Maurits.

Pemahaman itu penting terutama oleh pemerintah provinsi. Sebab, pengukuran IPKD dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten

dan kota. Di tingkat provinsi sendiri, pengukuran IPKD dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri. Sementara di tingkat kabupaten/kota akan ditunaikan oleh pemerintah provinsi melalui Badan Litbang Daerah atau Perangkat Daerah (PD) yang mengurusi kelitbangan.

Saat ini pengukuran IPKD telah dimulai dengan membentuk tim khusus dari Pusat Litbang Kemendagri. Pengukuran tahun ini didasarkan pada dokumen 2019. Sebelumnya, Badan Litbang Kemendagri juga telah melakukan simulasi pengukuran pada 2018 yang mengacu pada dokumen 2016 dan 2017. Hasil penghitungan simulasi tersebut sudah disampaikan kepada daerah dalam bentuk publikasi IPKD.

pihak seperti komponen Kemendagri terkait, Kementerian Keuangan, termasuk BPK. "Secara prinsip kita akan tetap kejar data itu, jangan sampai ada yang tidak terisi," ujar Maurits.

Kepala Subbidang Perimbangan Keuangan, Nuril Fikri Aulia menuturkan, pencarian data untuk pengukuran tahun ini berlangsung cukup baik. Sebab, pemerintah daerah sudah mengetahui adanya pengukuran IPKD dari simulasi yang dilakukan sebelumnya. "Informasi tersebut sudah banyak didengar oleh pemerintah daerah, sehingga tahun ini respons pemerintah daerah sudah lebih bagus dibanding tahun sebelumnya," ujarnya. Dirinya berharap, dengan terbitnya Permendagri No 19 Tahun 2020 berbagai kendala data pengukuran bisa teratasi.

Bangun aplikasi

Guna mempercepat dan menjaga keakuratan pengukuran, Badan Litbang Kemendagri telah membangun sebuah aplikasi. Saat ini aplikasi tersebut masih terbilang sederhana karena tengah dalam tahap pengembangan. Namun, Maurits menjelaskan penggunaan aplikasi tersebut tidak memengaruhi hasil, karena penilaian tergantung pada integritas tim dan keakuratan data yang dimasukkan. "Kalau itu (data akurat) sudah diperoleh apakah dengan metode konvensional yang selama ini ada, sebenarnya sudah mumpuni," ujarnya. Meski begitu, dengan adanya aplikasi ini dapat mendukung independensi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengukuran yang dilakukan.

Selain itu, Maurits berharap, Badan Litbang Kemendagri maupun pemerintah provinsi dapat membangun sistem yang menghimpun data sekaligus hasil pengukuran IPKD. Data tersebut kemudian dapat terintegrasi dalam sistem yang dimiliki Badan Litbang Kemendagri. Dengan demikian,

dapat terlihat peta kondisi pengelolaan keuangan di seluruh daerah, sehingga dapat memudahkan pembinaan. "Kita bangun pusat data khusus untuk pengelolaan keuangan daerah di Badan Litbang Kemendagri," ujarnya.

Sebab, lanjut Maurits, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Hasil itu akan disampaikan kepada pemerintah provinsi saban tahunnya melalui keputusan Mendagri. Harapannya, masing-masing daerah dapat menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai evaluasi untuk berbenah. "Hasil pemetaan ini sebagai landasan bagi komponen atau lembaga terkait untuk memberikan *treatment*," ujarnya.

Adapun tim pengukuran, selain dari Badan Litbang Kemendagri juga melibatkan komponen Kemendagri terkait lainnya. Dirinya juga tidak menutup kemungkinan, di masa mendatang bakal melibatkan pihak lain di luar Kemendagri, seperti lembaga *think tank* independen, kementerian, dan lembaga lainnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengukuran IPKD, Dian Martha Indarti menunjukkan bagaimana teknis pengukuran IPKD dilakukan. Marta terlebih dulu membuka aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan Badan Litbang Kemendagri. Ia menjelaskan, karena masih dalam tahap pengembangan, aplikasi ini baru bisa mengukur dimensi pertama yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Untuk lima dimensi lainnya masih dilakukan secara konvensional dengan menggunakan penghitungan *Microsoft Excel*. Namun, aplikasi tersebut sudah mampu mengukur rata-rata nilai kumulatif, dengan catatan telah mengantongi nilai akhir keenam dimensi.

■ MUJAENI



LAPORAN UTAMA

MENGUKUR KUALITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

BADAN LITBANG KEMENDAGRI MENERBITKAN INDEKS UNTUK MENILAI KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH. DENGAN INDEKS INI, KEMENDAGRI DAPAT MELIHAT KUALITAS KEPALA DAERAH. REGULASI BERUPA PERMENDAGRINYA PUN TELAH TERBIT.

Kepala daerah berperan penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas. Berbagai kebijakan yang dikeluarkannya akan menentukan tumbuh kembangnya suatu daerah. Melihat pentingnya keberadaan kepala daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pun telah mengatur tugasnya. Di antara tugas tersebut yakni, kepala daerah bertugas memimpin pelaksanaan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menerapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tugas lainnya, yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai tugas tersebut, seorang kepala daerah harus memiliki komitmen dalam menjalankannya perannya. Komitmen ini perlu dinilai capaian keberhasilannya dengan instrumen yang obyektif dan terukur. Namun sayangnya, selama ini instrumen tersebut belum ada, seperti data mengenai indeks kepemimpinan dan indikator pengukurannya secara menyeluruh.

Oleh karenanya, Badan Litbang Kemendagri menerbitkan alat ukur capaian kepemimpinan kepala daerah melalui indeks kepemimpinan kepala

daerah (IKKD). Pembentukan indeks ini sesuai dengan Pasal 381 ayat 1 dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah pusat perlu menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya, untuk menjadi bahan evaluasi. Pada tahun ini, Badan Litbang Kemendagri berhasil menginisiasi lahirnya Permendagri No 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, yang menjadi payung hukum program tersebut.



Ketua Tim Kajian IKKD, Hadi Supratikta, menjelaskan terbitnya IKKD berawal dari program *Leadership Award* yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada 2006. Seperti namanya, program tersebut menjadi ruang apresiasi bagi kepala daerah yang dinilai terbaik. Namun, pada perjalanannya program ini terhenti yang kemudian dilimpahkan kepada Kemendagri melalui Pusat Kebijakan Strategis (Jakstra). Program ini selanjutnya dialihkan ke Badan Litbang Kemendagri, usai Pusat Jakstra dihapus dari struktur Kemendagri.

Hadi menuturkan, bagaimana perjalanan Badan Litbang Kemendagri dalam membangun IKKD. Ia mengatakan, sebenarnya penyusunan IKKD berbarengan dengan indeks inovasi daerah yang juga dibikin Badan Litbang Kemendagri. Hanya saja, IKKD mengalami sejumlah kendala, sehingga pembentukannya agak lama dibanding indeks inovasi daerah. Usai melewati proses yang panjang, baik tahap simulasi maupun diskusi, akhirnya indeks ini dapat terbangun.

Hadi menyebutkan, dengan adanya IKKD, Badan Litbang Kemendagri dapat melakukan pengukuran untuk menentukan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan



penghargaan terhadapnya. "Hasil pengukuran ini akan dipublikasi, sehingga dapat memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerjanya," ujarnya.

Pemberian penghargaan ini dinilai penting dan strategis untuk memotivasi kepala daerah dalam memimpin. Hal ini supaya berdampak pada langkah kebijakannya seperti mempercepat pembangunan, meningkatkan kinerja dan pengabdian, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebab, kemajuan suatu daerah tidak dapat terlepas dari peran pemimpin yang berkualitas.

Meski saat ini tak sedikit gelaran peng-

hargaan yang diberikan kepada kepala daerah, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, media cetak, dan elektronik. Namun, penghargaan yang spesifik didasarkan pada penilaian personal kepala daerah masih belum tersedia. Sehingga, Oleh karena itu, dengan adanya indeks tersebut menjadi terobosan, untuk melengkapi penilaian penghargaan yang selama ini dilakukan.

Ia menjelaskan, sebagian besar konsep IKKD mengadopsi dari *Global Leadership Index* yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Secara singkat, IKKD ini diukur melalui dua variabel, yakni kinerja pemerin-

tah daerah dan kepemimpinan kepala daerah. Kedua variabel tersebut memiliki dimensinya masing-masing. Variabel kinerja pemerintah daerah misalnya, memiliki dimensi capaian kinerja dan penerimaan penghargaan. Sedangkan untuk variabel kepemimpinan kepala daerah mempunyai dimensi kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial. Masing-masing dimensi juga dilengkapi sejumlah indikator dengan parameter turunannya. Hadi menyebutkan, berbagai penghargaan yang diterima kepala daerah akan menjadi parameter penghitungan, termasuk hasil indeks inovasi daerah dan indeks pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan penilaian

Dalam melakukan penilaian ada dua tahap yang dijalankan oleh Badan Litbang Kemendagri. Tahap pertama, yaitu mengukur dan menilai variabel kinerja pemerintah daerah. Tahap ini didasarkan pada data dan informasi kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah daerah, kementerian, lembaga. Sedangkan tahap kedua, yakni mengukur dan menilai variabel kepemimpinan kepala daerah. Pada tahapan ini, penilaian dilakukan berbekal data dan informasi hasil survei kepemimpinan kepala daerah yang dilakukan Badan Litbang Kemendagri. Survei ini melibatkan responden yang



diambil secara acak, terdiri dari pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Untuk menguji keabsahan data dan informasi, selanjutnya dilakukan validasi lapangan kepada responden di daerah.

Kepala Subbidang Provinsi, Puslitbang Politik dan Pemerintahan Umum, Revota Dwi Bakti menuturkan dalam melakukan pengukuran dan penilaian, Badan Litbang Kemendagri membentuk dua tim yang terdiri dari tim pelaksana dan tim penilai. Tim pelaksana berasal dari internal Badan Litbang

Kemendagri. Sedangkan tim penilai terdiri dari internal Kemendagri, kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga *think tank*, akademisi, pakar atau praktisi.

Ada sejumlah tugas yang diemban oleh kedua tim tersebut. Misalnya, tim pelaksana yang memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi kinerja pemerintah daerah dari berbagai sumber. Data tersebut kemudian diolah dan dicocokkan dengan setiap variabel dan dimensi yang kemudian hasilnya diserahkan kepada tim penilai. Tak ha-

nya itu, tim pelaksana juga menyusun instrumen survei kepemimpinan kepala daerah. “Instrumen tersebut kemudian disebar kepada responden. Hasilnya kemudian diolah dan diserahkan kepada tim penilai,” tutur Revota.

Sedangkan tugas tim penilai, yakni melakukan penghitungan dan pengukuran skor variabel berdasarkan data yang diberikan tim pelaksana. Kemudian melakukan penilaian sesuai urutan perolehan skor masing-masing variabel dan menetapkan kepala daerah yang masuk nominasi maupun yang mendapatkan hasil terbaik.

Hasilnya, kemudian diserahkan kepada Mendagri melalui Badan Litbang.

Kepala daerah yang dapat mengikuti penilaian IKKD memiliki sejumlah persyaratan. Di antara persyaratan itu meliputi, sedang menduduki masa jabatan pada tahun kedua; kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun pertama mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK; tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.

Penghargaan akan diberikan kepada kepala daerah dengan jumlah nominasi paling sedikit 24 orang dengan rincian, 6 orang gubernur, 10 orang bupati, dan 8 orang wali kota. Jumlah itu bakal diambil setengahnya untuk dijadikan juara, yakni 3 gubernur, 5 bupati, dan 4 wali kota.

Hadi menambahkan, dalam perjalanannya simulasi penilaian dengan menggunakan IKKD sebelumnya telah dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak yang terdiri dari ABGC (*academic, business, government, community*) sebagai tim penilai. Hasil dari penilaian juga diberikan kepada kepala daerah yang berbarengan dengan gelaran *Innovation Government Award (IGA)*. “Simulasi langsung ditindaklanjuti dengan penerimaan penghargaan,” ujar Hadi.

Ia menjelaskan, di masa mendatang penghitungan variabel kinerja kepemimpinan kepala daerah bakal berbasis sistem aplikasi. Sehingga skor yang muncul nantinya, sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Namun, proses pembangunan sistem ini masih belum berjalan. Dirinya berharap, pada 2021 pembangunan tersebut dapat dimulai. Pada saat bersamaan, Hadi juga berencana akan membangun peta pembinaan yang didasarkan pada hasil penghitungan IKKD yang sudah menggunakan

sistem aplikasi. “Dari sistem yang ada, baru nanti akan membentuk temuan indikator yang masing kurang skornya, dan pembinaannya akan dilakukan sesuai temuan tersebut,” ujar Hadi.

Menurutnya, penilaian berbasis IKKD dapat menjadi landasan pemberian sanksi kepada kepala daerah apabila tidak memenuhi batas minimum kinerja. Ia menyamakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dikenai sanksi jika tidak berkinerja sesuai dengan ketentuan, baik pemotongan pendapatan, pemberhentian, atau sebagainya. “Kinerja itu hal yang dapat diukur jika tidak dipenuhi akan ada sanksi,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Hadi, pemberian sanksi terhadap kinerja kepala daerah masih belum jelas. Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tentang sanksi tersebut. Namun dirinya menyadari saat ini UU tersebut belum memiliki aturan turunan ihwal pemberian sanksi. Karenanya, hal itu harus didukung dengan peraturan pemerintah. Sebab, jika hanya dengan peraturan menteri, pemberian sanksi tersebut belum terlalu kuat. “Ini perlu dinaikan menjadi PP (peraturan pemerintah) sehingga bisa menekan dan memaksa,” katanya. Di sisi lain, dengan adanya sanksi yang diberikan, akan memunculkan rasa kesadaran kepala daerah untuk mendukung program penghitungan IKKD.

Hal lain yang perlu diperhatikan, imbuh Hadi, adalah perlu adanya keputusan Mendagri yang menjelaskan jenis-jenis rencana yang bakal diberikan kepada kepala daerah berprestasi. Menurutnya, rencana tersebut harus disetarakan dengan yang ada di Sekretaris Militer Presiden. Alasannya, pengukuran ini berkaitan dengan kinerja individu. Dengan pemberian rencana tersebut diharapkan dapat disematkan menjadi atribut di seragamnya. “Karena ini bersifat kepemimpinan, yang melekat ke orang,” pungkasnya.

■ MUJAENI

“**PENILAIAN BERBASIS IKKD DAPAT MENJADI LANDASAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA KEPALA DAERAH APABILA TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMUM KINERJA**”



Kemeriahan HUT Kemerdekaan RI meski di tengah Pandemi. Sejumlah warga tetap menggelar beberapa perlombaan untuk anak-anak dan remaja.
FOTO: FAJAR HARAMUKTI



Protokol Kesehatan di Ruang Rekreasi

Dua tempat wisata yang jaraknya terpisah jauh kompak menerapkan protokol kesehatan. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus yang tengah merebak. Roda perekonomian dapat berjalan, tetapi kesehatan juga tetap terjaga. Kedisiplinan pengunjung jadi kunci.

Seorang pria berdiri di pintu masuk pariwisata Pulau Tegal Mas, Lampung. Ia memegang alat pengukur suhu untuk mengecek setiap pengunjung yang hendak masuk. Sebelum diukur suhu tubuhnya, pengunjung diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir yang sudah disediakan. Jika suhu tubuhnya normal, pengunjung boleh masuk dengan melewati bilik disinfektan agar lebih steril. Pengunjung yang datang juga diwajibkan mengenakan masker. Kewajiban itu terpampang di papan pengumuman.

Segala aturan bagi pengunjung tersebut merupakan protokol kesehatan yang diterapkan pengelola pariwisata di Pulau Tegal Mas. Sejak pandemi merebak di sejumlah tempat, protokol kesehatan memang menjadi keharusan untuk diterapkan. Upaya ini untuk menangkang penyebaran virus.

Pulau Tegal Mas merupakan destinasi wisata yang menawarkan keindahan

bahari dengan panorama perbukitan yang hijau. Letaknya dikelilingi gugus pulau berbukit-bukit, membikin gelombang lautnya tak besar dan cukup tenang. Beragam permainan ditawarkan tempat ini, mulai dari *snorkeling*, *diving*, *banana boat*, *jet sky*, dan permainan lainnya. Pengunjung juga dapat melihat penangkaran ikan hiu yang hanya menggunakan pembatas jaring.

Bagi pengunjung yang hendak bermalam di Pulau Tegal Mas dapat menyewa penginapan yang disediakan pengelola. Ada beberapa pilihan kamar untuk menginap, dari yang model pondokan sampai bergaya vila. Bangunan pondokan terlihat lebih tradisional, beratapkan serupa jerami dan ber dinding kayu. Pondokan tersebut ada yang berdiri di atas pasir, ada pula yang langsung di atas laut dengan bangunan bergaya panggung. Pondokan tersebut dinamai dengan istilah model bangunannya, ada yang bernama Kampoeng Lombok Laut, Lombok Sasak, dan Lombok Mas. Sedangkan penginapan dengan konsep vila terlihat lebih modern dengan nama Palembang Tegal Mas.

Mengunjungi Pulau Tegal Mas seolah cocok bagi mereka yang ingin menyepi, entah menghilangkan penat dari kebisingan kota, atau mencari udara segar. Terlebih jika mengunjunginya bukan saat musim liburan. Suasana pulau bakal lebih sunyi, seolah menjadi tempat pribadi.

Keindahan Pulau Tegal Mas, menjadi harta karun wisata bahari di Lampung. Meski popularitasnya belum setenar Raja Ampat, Sabang, atau tempat ter-sohor lainnya. Namun, keindahan yang



dimiliki tak kalah dari tempat tersebut.

Optimisme pariwisata Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung optimis sektor pariwisata akan kembali bangkit dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 secara ketat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat acara Lampung *Tourism*

Reborn, Kebangkitan Industri Pariwisata dalam Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Taman Satwa Lembah Hijau beberapa waktu lalu.

Arinal mengatakan pariwisata sebagai salah satu dari penopang perekonomian, namun dalam pelaksanaannya tetap harus berhati-hati terhadap Covid-19. Menurutnya, disatu sisi perekonomian harus berjalan, tetapi di sisi lain menye-

lematkan masyarakat dari Covid-19 jauh lebih penting. Untuk itu, kebangkitan pariwisata harus diiringi dengan memperhatikan dengan ketat protokol kesehatan.

"Saya tegaskan kepada seluruh pelaku usaha pariwisata di Provinsi Lampung agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Ia juga telah mengeluarkan Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Lampung. Arinal meminta industri pariwisata termasuk ekonomi kreatif dapat mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan.

"Saya berharap keberlangsungan industri pariwisata dan ekonomi kreatif

tetap melaju dalam tatanan baru produktif dan Aman Covid-19. Dia akan produktif apabila memperhatikan situasi Covid-19 ini," katanya.

Selain itu, ia juga serius terhadap pembangunan infrastruktur dalam mendukung percepatan pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan pertemuannya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI (PUPR) di Jakarta beberapa waktu lalu. Salah satunya dukungan terhadap ruas jalan Bandar Lampung - Lempasing - Padangcermin - Teluk Kiluan.

Ia meminta agar semua optimis sektor pariwisata di Provinsi Lampung akan cepat bangkit dengan memperkuat sinergi demi kejayaan pariwisata Lampung dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap ini mampu menemukan langkah inovatif, solutif dan terobosan baru untuk bersama-sama membangkitkan pariwisata Lampung dalam tatanan baru produktif dan aman Covid-19," katanya.

Mencontoh Kota Bandar Lampung

Salah satu contoh daerah di Provinsi Lampung yang sigap menerapkan protokol kesehatan di area rekreasi adalah Kota Bandar Lampung.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung meminta para pengelola objek wisata konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan, dinas ini rutin memantau konsep protokol kesehatan yang disediakan pengelola wisata terkait penerapan protokol kesehatan sejak awal Juni lalu. Mereka juga memberikan penghargaan kepada objek wisata yang konsisten menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya kepada pengelola Taman Wisata Lembah Hijau (TWLH).

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Rismawati menjelaskan, pemberian penghargaan kepada Taman Wisata Lembah Hijau (TWLH) merujuk pemantauan dan pembinaan penerapan protokol

kesehatan periode 6 Juni-6 Juli 2020.

Pemantauan mulai dari peralatan untuk implementasi protokol kesehatan yaitu, alat pendeteksi suhu tubuh, ketersediaan tempat cuci tangan pada air mengalir, ketersediaan hand sanitizer, dan sabun. Selain itu, database pengunjung, termasuk apakah pengunjung memiliki riwayat perjalanan dari luar kota khususnya dari daerah zona merah COVID-19.

Lembah Hijau menjadi objek wisata pertama di Bandar Lampung yang mendapat Piagam Penghargaan Kepatuhan dan Tertib Melaksanakan Protokol Kesehatan. Ia berharap, ke depan semakin banyak pengelola objek wisata lainnya di Kota Berseri meraih penghargaan serupa.

Bisnis perjalanan wisata di Lampung periode adaptasi kebiasaan baru masih belum pulih. Menurutnya, meski ada momen libur panjang Agustus ini, kenaikan bisnis biro perjalanan wisata Lampung hanya berkisar 15 hingga 20 persen.

Pemerintah berupaya untuk memulihkan sektor pariwisata. Satu di antaranya, menerapkan protokol kesehatan di lingkungan bisnis biro perjalanan agar kepercayaan wisatawan tumbuh kembali.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi promosi wisata berbasis kesehatan pada masa normal baru. Itu dipicu masa normal baru pola hidup masyarakat berubah. Bentuk promosi wisata sehat yang dilakukan melakukan promosi pariwisata virtual.

Kota Lama

Tempat wisata lain yang menarik untuk dikunjungi adalah Kota Lama di Semarang, Jawa Tengah. Sama dengan Pulau Tegal Mas, semenjak pandemi menyebar, sejumlah fasilitas protokol kesehatan dibangun untuk mencegah penyebaran virus. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menempatkan fasilitas air mengalir, lengkap dengan sabun di beberapa titik. Harapannya, pengunjung dapat rajin mencuci tangan. Selain itu, para petugas keama-



■ ATAS: Penampakan gedung-gedung peninggalan Belanda di Kawasan Kota Lama, Semarang Jawa Tengah

■ BAWAH: Wakil Walikota Semarang berfoto bersama Kepala Badan Litbang Kemendagri beserta jajarannya.

nan juga turut berjaga di beberapa titik, untuk memperingatkan pengunjung yang tidak mengenakan masker atau berkerumun. Ruko-ruko yang menjajakan beragam olahan pangan pun, juga mewajibkan penggunaan masker kepada pengunjung.

Kota Lama memang salah satu magnet wisatawan yang dimiliki Semarang. Destinasi ini menyuguhkan bangunan tua peninggalan Belanda. Lokasi antar bangunan yang membentuk kompleks, membuat pengunjung berasa di Eropa. Tak keliru jika Kota Lama juga terkenal dengan sebutan *Little Netherland*. Kini, bangunan tersebut banyak dimanfaatkan menjadi rumah makan, kafe, dan beberapa fungsi lainnya. Namun ada pula yang dibiarkan kosong dan terbengkalai.

Ada beberapa bangunan yang menjadi *landmark* kawasan tersebut. Satu di antaranya adalah bangunan gereja dengan atap *mblenduk* atau berbentuk kubah. Bangunan ini merupakan gereja Kristen tertua di Jawa Tengah. Gereja yang diberi nama Immanuel ini beberapa kali mengalami renovasi dan masih digunakan untuk peribadatan.

Tepat di samping bangunan gereja, terdapat sebuah taman. Tempat tersebut dinamai Taman Srigunting. Taman ini berada di tengah-tengah Kota Lama. Konon, pada kolonial Belanda menjadi ruang publik sekaligus parade militer. Sampai saat ini, taman itu masih terlihat asri dengan dipayungi pohon besar yang rindang. Pengunjung biasanya memanfaatkan tempat tersebut untuk beristirahat karena dilengkapi dengan sejumlah tempat duduk.

Kawasan Kota Lama terbilang luas sekitar 31 hektare. Tak heran, jika mengelilinginya dengan berjalan kaki cukup bikin berkeringat. Namun jangan khawatir, bagi pengunjung yang tetap ingin berkeliling tetapi tanpa mengeluarkan banyak tenaga, dapat menaiki becak yang cukup ditemui. Selain becak, pengunjung juga bisa menyewa sepeda atau otopet.

Sejak Maret, 55 tempat wisata di Jawa Tengah tutup sementara sebagai imbas pandemi virus corona. Wisata budaya, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, hingga wisata pendidikan terhenti.

Industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuak pandemi Covid-19. Sebanyak 17.800 pelaku pariwisata di Jawa Tengah (Jateng) menghentikan aktivitas pariwisata. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada ditutupnya tempat-tempat wisata, tapi juga berhentinya usaha-usaha penopang.

Pariwisata menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian Jawa Tengah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah pada 2019 lalu mencapai Rp 14,45 triliun.

Pemerintah daerah di Jawa Tengah sedang berbenah menyiapkan infrastruktur untuk penerapan kebiasaan baru bagi wisatawan. Tahun ini, Jawa Tengah menargetkan jumlah kunjungan 58,5 juta wisatawan. Terdiri atas 49,5 juta wisatawan domestik dan 900 ribu wisatawan mancanegara.

Pulau Tegal Mas, Kota Lama, maupun Lembah Hijau merupakan contoh tempat wisata yang telah dibuka meski di tengah pandemi. Pembukaan ini seiring dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dengan mewajibkan penerapan protokol kesehatan. Tak semua tempat wisata dibuka, karena kebijakan ini juga mempertimbangkan banyaknya penyebaran virus. Sebelumnya, sektor pariwisata sempat terpuruk akibat diterpa wabah. Pandemi yang merebak membuat daerah melakukan pembatasan terhadap aktivitas warga maupun pendatang. Tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian ditutup untuk sementara waktu, termasuk lokasi wisata. Namun, meski fasilitas protokol kesehatan disediakan oleh pengelola wisata, kedisiplinan pengunjung untuk taat aturan, menjadi kunci putusnya rantai penyebaran.

■ MUJAENI/RIFKI

LEBIH DEKAT

Dari Isu Kepemiluan sampai Keterwakilan Perempuan

Bagi Aditya Perdana (40) pemilu adalah hal menarik untuk dikaji karena memiliki banyak aspek. Bersama Puskapol Universitas Indonesia, Bapak dua anak ini fokus mengkaji keterwakilan perempuan dalam panggung politik. Hasil kajiannya dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah. Kini tak sedikit perempuan yang berani unjuk gigi di ranah politik.



Aditya Perdana

Direktur Utama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)

Tempat Tanggal Lahir :

Jakarta, 24 Maret 1980

Pendidikan :

SI Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI 2004

S2 Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Politik Ilmu Pengetahuan UI 2007

S3 Ilmu Politik Universitas Hamburg Jerman 2014

W Mengkaji pemilu, lanjutnya, tidak hanya pada saat pemungutan suara. Namun jauh sebelum itu, proses persiapan dan pihak yang terlibat dapat turut diulas. Menurutnya, pemilu merupakan wahana untuk melihat bagaimana masyarakat sipil dapat berpartisipasi. Pemilu juga menjadi kontestasi paling nyata bagaimana elite politik bertarung. Meski tak semua elite politik menjual gagasan, tetapi ada pula yang menjual identitasnya. Bahkan, usai pemilu pun beragam isu dapat digali, misalnya realisasi janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye.

Di sisi lain, pemilu juga tak hanya melibatkan pihak yang menjadi bagian dari kontestan. Sebab, kelompok-kelompok yang di luar kontestan, seperti organisasi masyarakat, LSM, dan sejenisnya juga turut berkontribusi terhadap jalannya ajang tersebut. Berbagai peran dimainkan, mulai dari memobilisasi para pemilih, memberikan penga-

wasan, dan masih banyak lagi peran lainnya. Apalagi belakangan ini, tak sedikit bermunculan perkumpulan yang mengatasnamakan relawan. Hal itu menarik untuk ditelisik, seperti motif yang dibawa apakah bekerja murni sepenuh hati atau memang ada maksud tertentu. Menurutnya, membicarakan pemilu di Indonesia tidak serta merta melihat penyelenggaraan di negara lain. Sebab, setiap daerah di Indonesia memiliki banyak faktor yang melingkupi, sehingga mewarnai pelaksanaannya.

Usai merampungkan studi sarjananya di Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana sempat melakoni profesi sebagai wartawan media asing yang berada di Jakarta. Media tersebut fokus terhadap isu-isu politik termasuk meliput gelaran pemilu. Dia sempat menjadi saksi bagaimana Indonesia menggelar kali pertama pemilu presiden dilakukan secara langsung. Namun, ia hanya bertahan beberapa bulan, sebelum akhirnya memilih untuk meninggalkan profesinya tersebut. Meski begitu, keputusan ini tak lantas menjauhkannya dari aktivitas yang bersinggungan dengan isu-isu kepemiluan. Sebab, tak lama usai melepas pekerjaannya sebagai wartawan, Aditya memutuskan untuk bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga konsen mengawal isu-isu kepemiluan.

Kala itu, LSM yang menaunginya banyak menyoroti soal regulasi kepemiluan. Berproses menjadi anggota LSM membuat Aditya memiliki pengetahuan melimpah, karena sering berinteraksi dengan jaringannya di daerah. Aditya juga sempat bergabung dengan LSM yang menyoroti isu-isu tata kelola pemerintahan. Dia bersama timnya banyak melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam melihat berbagai isu, seperti pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah, dan lainnya. Namun, 15 tahun terakhir ini, aktivitas Aditya banyak dihabiskan di kampus dengan menjadi bagian dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI).

Keterwakilan perempuan

Aditya menjadi salah satu orang yang terlibat dalam mengawal isu keterwakilan perempuan dalam pemilu. Menurutnya, pengawalan isu tersebut diakui menjadi salah satu tolok ukur kajian Puskapol UI. Sejak 2003 Puskapol UI mendorong agar afirmasi perempuan sebanyak 30 persen dapat diwadahi di dalam regulasi. Awalnya afirmasi itu hanya bersifat imbauan kepada partai politik. Namun, rupanya upaya itu belum memberi dampak yang maksimal. Lantas, pada 2007 afirmasi tersebut didorong agar menjadi sebuah kewajiban bagi partai.

“

JIKA PERSOALAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK TIDAK SEKADAR MENDORONG BANYAKNYA PEREMPUAN YANG MAJU SEBAGAI PESERTA. NAMUN, MENEMPATKAN MEREKA PADA NOMOR URUT YANG STRATEGIS

Dengan kebijakan tersebut, berdampak pada makin banyaknya perempuan yang berani mencalonkan diri pada pemilu. Selain itu, dalam setiap pemilu, isu keterwakilannya juga selalu dibicarakan untuk terus dibenahi.

Namun, meski keikutsertaan perempuan semakin naik, tetapi setelah dicek pelaksanaannya, ternyata banyak yang ditempatkan di nomor urut bawah. Ini membuat peluang keterpilihannya makin rendah, ketimbang laki-laki. Aditya mulai menyadari, jika persoalan keterlibatan perempuan dalam berpolitik tidak sekadar mendorong banyaknya perempuan yang maju sebagai peserta. Namun, menempatkan mereka pada nomor urut yang strategis.

Aditya menjelaskan alasan mengapa perempuan perlu diperhatikan secara khusus dalam pesta demokrasi. Hal itu dilandasi masih sedikitnya keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik. Padahal, faktanya jumlah penduduk di Indonesia lebih didominasi perempuan ketimbang laki-laki. Di sisi lain, kalangan aktivis perempuan berpendapat jika perempuan tidak memiliki banyak kesempatan di ruang publik maupun sosial. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki banyak peluang, sehingga menjadi modal kuat untuk maju di arena politik. Akibatnya, sedikit perempuan bisa mencapai posisi yang setara dengan laki-laki.

Meski begitu, kata Aditya, afirmasi tersebut merupakan usaha sementara untuk mendorong keterlibatan perempuan. Jika saatnya nanti terjadi kesetaraan, maka tidak menjadi soal bila perhelatan pemilu diberikan secara bebas tanpa memberikan kuota khusus. “Saat ini masih perlu diafirmasi untuk memberikan keseimbangan,” ujar Aditya.

Menurutnya, saat ini Undang-Undang yang ada sudah cukup untuk mendukung keterlibatan perempuan. Hanya saja, yang perlu terus kawal yakni pembenahan di internal partai politik agar memberi kesempatan pada perempuan. Hal ini juga bergantung pada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini tengah dibahas oleh DPR. Beberapa isu yang mencuat dari pembahasan itu salah satunya menyoal perlu tidaknya mengubah sistem pemilu dari yang proporsional terbuka menjadi tertutup. Puskapol UI sendiri bakal mengawal isu tersebut dengan tetap mementingkan isu keterlibatan perempuan. “Sehingga ketika perdebatan itu dimasukkan, posisi kami menjaga isu keterwakilan perempuan. Kondisi apa yang paling ideal dengan sistem yang berbeda itu,” tuturnya.

Kedua sistem tersebut memiliki dampak yang beragam terhadap terpilihnya perempuan. Misalnya, dalam sistem pemilu proporsional terbuka

yang bermakna bahwa seorang pemilih bebas menentukan calonnya tanpa melihat lelaki atau perempuan. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup -Jika mengaca pada Orde Baru- yang dilakukan dengan cara hanya memilih partai politik. Adapun calon terpilih kemudian ditentukan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai politik. Pada sistem ini, kontrol penuh berada pada partai politik.

Persoalannya, jika sistem proporsional tertutup diterapkan, maka komitmen partai politik untuk memilih calon perempuan sesuai dengan amanat regulasi perlu dipertanyakan. "Dengan terbuka saja parpol masih sering lalai, apalagi tertutup. Jadi tidak ada jaminan, partai akan menurun. Partai politik mencalonkan caleg orientasinya cuma satu biar menang," ucapnya.

Problem lainnya terkait isu keterwakilan perempuan, adalah pembiayaan politik. Sebab, perempuan yang mencalonkan diri cenderung bergantung pada restu dari suami, termasuk soal finansialnya. Karena itu, Puskapol UI mendorong adanya pembiayaan khusus yang dialokasikan partai untuk mendukung kontestan dari perempuan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari subsidi yang diberikan pemerintah kepada partai politik. "Kita berharap ada beberapa persen yang dialokasikan untuk calon perempuan," harap Aditya.

Berbagai temuan yang disodorkan Puskapol UI tersebut, merupakan hasil riset yang diolah dan disusun untuk menjadi rekomendasi kebijakan. Menurut Aditya, sebuah kebijakan memang sudah seharusnya didasarkan pada data empiris dan argumen yang kuat, salah satunya melalui riset. Selama ini, upaya itulah yang dilakukan oleh Puskapol UI. Berbagai rekomendasi yang disusun, kemudian dibincangkan bersama pemangku kebijakan. "Kita mengerjakan riset tidak semata-mata untuk kepuasan batin, tetapi ada dampak yang luas bagi mas-

asyarakat dalam konteks ini keikutsertaan perempuan," ujar Aditya.

Kaji pilkada

Selain menyoal keterwakilan perempuan dalam pemilu, saat ini Puskapol UI menjadi salah satu lembaga yang tengah melakukan kerja sama dengan Badan Litbang Kemendagri, untuk mengkaji jalannya pilkada.

Berdasar proposal yang diajukan kepada Kemendagri, Puskapol UI hendak melakukan evaluasi secara komprehensif, khususnya terkait pengaruh pilkada terhadap tata kelola pemerintahan. Beberapa pertanyaan yang berusaha digali, yakni apakah pilkada itu memberikan kontribusi terhadap perubahan di suatu daerah? Apakah jauh lebih baik atau seperti apa? Aditya menuturkan, pertanyaan itu muncul, karena lebih dari 15 tahun pilkada berlangsung, tak sedikit kepala daerah yang tertangkap lembaga rasuah karena korupsi. Laku korupsi itu salah satunya didukung dengan banyaknya ongkos yang dikeluarkan saat kampanye.

Namun, lanjut Aditya, berita positif tentang pilkada juga tak kalah banyak, salah satunya adalah mampu melahirkan tokoh-tokoh baru. Aditya mencontohkan, seperti Presiden Joko Widodo yang berangkat dari pilkada Solo dan Jakarta. Ada pula cerita pilkada di daerah lain, yang mampu melahirkan pemimpin berkarakter kuat, sehingga membawa perubahan yang lebih baik. Hal itu menunjukkan, jika pilkada bukan hanya diwarnai cerita buruk, tetapi juga sebaliknya. "Kita harus sampaikan banyak cerita sukses yang dilakukan kepala daerah dengan berbagai cara dan keterbatasan yang dimiliki," kata Aditya.

Aditya juga turut berkomentar ihwal jalannya pilkada yang bakal digelar di tengah pandemi pada Desember 2020 mendatang. Menurutnya, menjamin kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih menjadi sebuah keharusan. Penerapan

protokol kesehatan merupakan hal krusial yang harus diterapkan dalam setiap tahapannya. Dukungan terhadap pembiayaan pilkada juga harus diperhatikan, mengingat kebutuhan logistik tahun ini meningkat seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), masker, pengukur suhu, dan fasilitas lainnya,

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga perlu menyiapkan jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Ia mencontohkan, meski jumlah peserta kampanye di ruang terbuka dibatasi, tetapi bukan tak mungkin saat di lapangan terjadi pelanggaran. Penyelenggara perlu menyiapkan mitigasi tindakan untuk menanganinya. "Misalnya ada pertemuan terbuka, enggak pakai masker, siapa yang menghukum mereka? Mekanisme penyelesaiannya seperti apa? Itu menurut saya yang paling urgen," tuturnya.

Terlepas dari itu, dirinya berharap, gelaran pilkada di tengah pandemi dapat menjadikan penanganan Covid-19 menjadi isu yang mengemuka. Menurutnya, calon petahana dapat memanfaatkan momen ini untuk menjaga popularitas dengan mengeluarkan kebijakan yang jitu. Sebab, penyelenggaraan atau adanya pelaporan bantuan yang tidak merata, bakal menjadi ancaman bagi petahana. Artinya, lanjut Aditya, situasi pandemi ini membuat jalannya pilkada dapat lebih terbuka untuk membicarakan isu-isu ihwal kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Isu-isu yang berhembus tidak lagi menyoal identitas, SARA, maupun berita bohong.

Ihwal adanya fenomena petahana yang menempel gambar diri pada kemasan bantuan sosial, menurutnya hal itu adalah bukti ketidakpercayaan diri. Sebab, bantuan kepala daerah sudah pasti menunjukkan identitas yang jelas. Kepala daerah yang melakukan strategi tersebut, disinyalir jarang turun ke lapangan karena khawatir tak dikenal masyarakat.

■ MUJAENI



Mendagri Tegur Bupati Karawang

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan teguran tertulis untuk Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana selaku bakal pasangan calon (Paslon) kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, karena menggelar arak-arakan massa saat melakukan pendaftaran di Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada Jum'at, (4/09/2020) sebagaimana diberitakan dalam media online.

Teguran tertulis tersebut dikeluarkan pada Jumat tanggal 4 September 2020 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik atas nama Mendagri. Dengan menggelar arak-arakan massa, Mendagri menyatakan, Bupati Karawang selaku bakal paslon dinilai telah menimbulkan kerumunan massa. "Dan hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," demikian bunyi poin 1 pada teguran tertulis Mendagri tersebut.

Lebih lanjut, dijelaskan sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bila dikaitkan dengan aturan lain, tentu hal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menegaskan bahwa, "Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum," tegasnya.

Mengingat di tengah pandemi Covid-19, Mendagri menyatakan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Mendagri juga menyampaikan saat ini telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 untuk mengoptimalkan upaya pencegahan. "Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh Indonesia," ujar Mendagri.

Maka berdasarkan hal tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jabar sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Cellica Nurrachadiana selaku Bupati Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama," pungkasnya.

■ kemendagri.go.id

Atasi Tumor Otak dengan Bakteri Salmonela

Dalam jurnal *Molecular Therapy Oncolytics* volume ke 7, Nalini Mehta, Johnathan G. Lyon, Ketki Patil dan tiga peneliti lainnya menerbitkan sebuah artikel ilmiah berjudul *"Bacterial Carriers for Glioblastoma Therapy"*.

Glioblastoma adalah kanker otak yang dikenal ganas. Tingkat kelangsungan hidup pasien glioblastoma sangat suram. Sekitar 30 persen pasien hanya mampu bertahan hidup selama dua tahun setelah terdiagnosis. Karena itu, keberhasilan 20 persen saja dalam pengujian merupakan indikasi yang menggembirakan.

Faktor yang menyebabkan tumor ini sulit disembuhkan adalah posisinya yang bersembunyi di balik lapisan membran darah-otak. Bagian ini memisahkan peredaran darah dari cairan otak itu sendiri.

Kesulitan itulah yang mereka coba urai. Dalam artikel yang mereka tulis, mereka menyatakan telah berhasil mengubah *Salmonella typhimurium* melalui proses rekayasa genetika.

"Bakteri dimodifikasi, yang sebelumnya mengincar usus manusia, kami ubah agar bisa menargetkan tumor di otak," demikian yang tertulis dalam jurnal.

Para peneliti menguji salmonela rekayasa ini terhadap sekelompok tikus yang sudah disuntikkan sel tumor glioblastoma dalam 100 hari—setara dengan 10 tahun dalam umur manusia.

Cara itu, menurut anggota tim peneliti Johnathan Lyon, seperti dikutip dari *Science Alert*, Jumat pekan lalu, bisa mengatasi keterbatasan obat

konvensional yang tidak mudah menembus membran tersebut.

"Dengan demikian, metode penyembuhan baru harus ditargetkan langsung ke glioblastoma," ujar Lyon, yang juga peneliti di Department of Biomedical Engineering Georgia Institute of Technology and Emory School of Medicine.

Agar cara tersebut berhasil, diperlukan sel genetika yang dapat menembus langsung ke tumor. Bentuk *Salmonella typhimurium* itu kemudian dimodifikasi menjadi purine yang juga dibutuhkan oleh sel tumor glioblastoma.

Namun sebenarnya itu hanyalah perangkap. Ketika terjadi interaksi, dua senyawa yang disebut sebagai azurin dan p53 beraksi untuk melumpuhkan sel tumor tersebut. "Cara kerjanya seperti rudal genetika. Mengunci target, lalu menghancurkannya," kata Lyon.

Dalam jurnal, para peneliti mengklaim cara ini jauh lebih akurat ketimbang operasi. Efek samping pun tak akan muncul karena sifat penyembuhannya adalah detoksifikasi.

Harapan baru tentu saja. Namun masih dibutuhkan waktu dan riset lebih banyak lagi. Maklum, pengujian terhadap tikus berbeda dengan terhadap manusia, khususnya dalam hal dosis.

"Kami harus menerjemahkannya kembali ke dalam ukuran manusia," ujar Lyon. "Yang jelas, metode ini sudah terbukti efektif dan bisa disempurnakan untuk pengobatan tumor pada masa depan." (MSR/TEMPO)



Tanaman Kamar untuk Atasi Insomnia

Sulit tidur menjadi masalah umum yang dihadapi banyak orang masa kini. Gaya hidup dan stres menjadi penyebab utamanya. Beberapa tanaman, dengan kemampuan menghasilkan oksigen yang baik, dipercaya dapat membantu membuat tidur lebih nyenyak.

Sejumlah studi ilmiah telah menemukan bahwa keberadaan tanaman di dalam kamar tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Keberadaan tanaman membuat seseorang merasa nyaman dan secara otomatis menurunkan tingkat stres. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa tanaman efektif dalam mengurangi stres dan mengisi tubuh dengan energi positif.

Tak hanya itu, penelitian juga menemukan beberapa tanaman dengan kemampuan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang lebih baik. Dengan kondisi ini, tubuh jadi lebih rileks untuk menuju tidur yang lebih baik.

Selain itu, Anda juga tak perlu khawatir soal perawatan tanaman di kamar tidur. Alam memiliki keanekaragaman yang luar biasa, ribuan tanaman dapat hidup dengan paparan sinar matahari yang sedikit.

Berikut beberapa pilihan tanaman di kamar agar tidur lebih nyenyak, mengutip berbagai sumber.

LIDAH BUAYA

Lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang punya banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk salah satunya meningkatkan kualitas tidur. Mengutip Mashrita Nature Cloud, lidah buaya juga terpilih sebagai salah satu tanaman paling efektif untuk membersihkan udara dalam penelitian NASA.

AGLONEMA

Aglonema adalah tanaman dalam ruang populer yang berasal dari kawasan Asia selatan. Ada ratusan spesies dengan kebiasaan tumbuh yang berbeda dari aglonema. Namun, kebanyakan dari mereka rentan terhadap musim dingin yang ekstrem.

Sama halnya seperti lidah buaya dan peace lily, NASA menjadikan aglonema sebagai salah satu pemurni udara terbaik. Tanaman tropis ini juga memancarkan oksigen dalam jumlah tinggi yang dapat membantu tidur lebih baik.

Tak perlu khawatir, aglonema juga menjadi salah satu tanaman hias yang paling tahan lama. Aglonema bisa bertahan hidup dalam kondisi cahaya rendah hingga udara kering sekali pun.

PEACE LILY

Peace lily merupakan tanaman yang hidup di kawasan tropis. NASA Clean Air Study menemukan bahwa peace lily dapat membersihkan semua jenis racun dalam udara.

Selain itu, peace lily juga menjadi salah satu tanaman 'anti-manja'. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di tempat teduh dan hanya membutuhkan sedikit cahaya matahari untuk berkembang. Jangan terlalu sering menyiramnya. Anda cukup memastikan kelembapan tanah.

GARDENIA

Aroma bunga gardenia sangat baik untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kecemasan. Namun demikian, mengutip Pilea, tanaman ini membutuhkan keseimbangan cahaya dan kelembapan yang sempurna untuk berkembang. Taruh tanaman ini di sisi jendela kamar tidur Anda, agar tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup.

MELATI

Sama halnya dengan gardenia, aroma melati yang lembut dapat menenangkan pikiran dan tubuh, sekaligus mengurangi tingkat kecemasan Anda. Melati memberikan efek positif pada tidur yang dapat membuat Anda lebih produktif di hari berikutnya.

(cnnindonesia)

Gimik A Gama Abad ke-21

MEMBACA kitab putih ini ibarat mengabui mata kita. Penalaran dan pemikiran yang semula jemawa menjulang tiba-tiba terbanting tak ada sebab. Sesungguhnya betapa dangkal dan tumpul kita menghayati hidup yang baik dan benar. Abad ke-21 lebih menorehkan manusia-manusia bingung karena tak acuh terhadap warisan agung.

OLEH ANTON SUPRAYANTA

WATTIMENA memberikan contoh mudah dan lugu dirinya sehingga hari ini ia cakap dan cerdas mengutuki pembaca. Alkisah, sejak kecil ia sangat menyukai seluk-beluk spiritual. Ia terlibat aktif dalam agama yang diberikan orang tuanya. Agama warisan. Hebatnya, ia berhasrat tinggi mempelajari ajaran berbagai agama.

Akan tetapi, ketika melihat ajaran berbagai agama dan melihat perilaku nyata orang-orang beragama, ia suka bingung. Wattimena kecil bingung! Mengapa sangat berbeda dengan fakta?

Sebermula cerita ada agama yang mengajarkan damai dan kerukunan. Namun, umatnya sangat agresif (penuh kekerasan), sombong, dan menindas hak-hak asasi manusia. Ada pula agama yang mengajarkan kesederhanaan dan cinta. Namun, perilaku umatnya suka pamer kekayaan dan manipulatif. Kembali Wattimena bingung.

Dalam kelana hidupnya, Wattimena terbentur dialektika. Ternyata agama

berbeda dengan religio-sitas. Agama berbeda dengan spiritualitas. Sampailah Wattimena kini beroleh jawaban argumentatif. Inilah akar kemunafikan yang ia temukan dalam hidup sehari-hari. Dari sinilah salah satu spot incaran kritis nyerocos: “apa perbedaan antara agama, religio-sitas, dan spiritualitas?”

Abad ke-21 menjadi titik balik dan portal pikir spiritualitas bagi kita semua yang masih setia beragama. Mengapa? Salah kaprah beragama dipamerkan. Gincu beragama dinyinyirkan. Hasilnya, tidak sedikit agama terjatuh dalam formalisme. Ciri-cirinya gamblang, manusia beragama hanya mementingkan tampilan luar, seperti melaksanakan ritual dan aturan. Mereka melupakan pesan luhur dari agama yang bersangkutan.

Jika sudah terjebak formalisme, agama apa pun dengan gampang ditekuk menjadi mesin politik. Agama mudah digunakan sebagai pembenaran untuk pembodohan, kebencian, dan kemalasan berpikir. Ayat-ayat dipenggal lalu diunggulkan menjadi



Untuk Semua Yang Beragama; Agama dalam Pelukan Filsafat, Politik, dan Spiritualitas

Penulis : Reza AA Wattimena

Penerbit : Kanisius

Cetak : 2020

Tebal : xii+220 halaman

ISBN : 978-979-21-6393-3

gimik untuk pembenaran sikap jahat terhadap perbedaan. Ujung-ujungnya, agama kehilangan keluhuran. Agama digiring menjadi sumber intoleransi dan kekerasan yang mencegat kemajuan masyarakat.

Buku dengan konten delapan bab mewah anggitan Reza AA Wattimena

ini menjadi bukti, bukan hoaks, bukan utopia, bukan omong kosong belaka, bahwa keberagamaan kiwari nyata telah terjadi pendangkalan yang semakin mencolok mata. Sumir keberagamaan manusia Indonesia, betapa tidak!

Guraunya, formalisme agama mungkin menjadi virus sosial yang sangat mematikan di dunia sekarang ini. Dalam konteks ini, formalisme agama adalah pemahaman beragama yang terjebak pada bentuk (*form*) semata, seperti ritual, dan aturan-aturan yang sudah ketinggalan zaman. Orang dengan cap beragama lalu sibuk diri mengikuti aturan berdoa dan aturan moral yang dibuat ratusan, bahkan ribuan tahun silam, tanpa paham isi dan tujuan asalnya. Ia lalu cenderung tidak toleran terhadap perbedaan, bersikap fanatik dan radikal.

Manusia beragama wajib paham. Diksi agama (bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *a* dan *gama*. *A* berarti tidak, *gama* berarti kacau. Tentunya jauh-jauh silam agama tertanam dalam pandangan dunia Hinduisme dan Buddhisme. Agama dapat dicerna sebagai upaya manusia untuk menghindari kekacauan. Agama adalah ikatan yang mencegah kekacauan terjadi.

Satu ilustrasi yang menohok dan mencolok di Indonesia, agama masih dijadikan biang keributan atau bahkan sekadar hiasan. Agama dipaksa untuk tampil baik dan saleh di hadapan umum, meskipun etiket dan cara berpikir manusia aslinya sungguh bejat dan korup. Tak aneh, para koruptor tiba-tiba terlihat berpakaian agamis ketika menjalani sidang tindak pidana korupsi. Tak heran, para pencuri uang rakyat rajin menyumbang ke rumah-rumah ibadah guna menutupi kebejatan sikap yang sesungguhnya. Adakah contoh-contoh lain?

Agama pada abad ke-21 di Indonesia harus belajar kembali tentang sinergi intuisi dan akal budi. Intuisi kuat dibesarkan peradaban Asia. Intuisi hadir menjadi panglima sebelum kedatangan pikiran. Intuisi menyediakan kejernihan manakala mencerna keadaan. Akal

budi kuat dibesarkan peradaban Eropa. Akal budi melihat alam sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum alam haruslah dipahami secara sempurna dan tuntas.

Dua peradaban (intuisi dan akal budi) mampu menciptakan balansi, asalkan kita semua yang beragama mau dan sadar saling belajar. Camkan, intuisi menciptakan kejernihan dan keseimbangan batin. Sementara itu, akal budi akan menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang menindas represif dan terbelakang di dalam agama. Adab intuisi dan akal budi akan menciptakan manusia yang seimbang, yang cakap beragama secara seimbang. Manusia-manusia pongah Indonesia

“

AGAMA DIPAKSA UNTUK TAMPIL BAIK DAN SALEH DI HADAPAN UMUM, MESKIPUN ETIKET DAN CARA BERPIKIR MANUSIA ASLINYA SANGGUH BEJAT DAN KORUP

sungguh membutuhkan kekuatan adab agung ini.

Reza AA Wattimena menawarkan lima butir refleksi tentang pandom kehidupan beragama di Indonesia. *Pertama*, kebijaksanaan Barat-Timur. Indonesia bisa belajar sikap rasional beragama dari adab Eropa. Iman dipertanggungjawabkan dengan akal sehat dalam pluralitas hidup. Sikap spiritualitas adab Asia akan melentikkan hidup damai dengan identitas seluas alam semesta.

Kedua, alam dan akal budi. Semua agama mulai harus menyerukan upaya pelestarian alam. Alam mulai rusak karena gaya hidup manusia. Singkirkan pandangan bahwa manusia adalah tuan tanah di bumi dan alam adalah

pembantu. Alam dan manusia sama. *Ketiga*, agama dan akal budi. Akal budi nomor satu di Eropa, sedang di Asia, akal budi hanyalah alat untuk bertahan hidup. Agama bisa melihat akal budi untuk memurnikan dirinya dari mitos dan keterbelakangan berpikir sembari menyatu dengan yang Ilahi.

Keempat, keseimbangan batin. Dengan akal budi, manusia beragama bisa memilah ajaran agama yang masih cocok dengan zaman dan yang mesti ditinggalkan. Dengan cara spiritual Asia, keseimbangan batin berjodoh. Manusia beragama di Indonesia bisa menjadi manusia cerdas sekaligus seimbang secara emosional. *Kelima*, agama dan keadilan sosial. Tindakan agama bergerak ke aksi sosial nyata. Doa dan laku spiritual bergandengan berjuang mewujudkan keadilan sosial. Keduanya sinergis. Inilah agama mondial, mendunia, yang memperoleh inspirasi dari dunia, sekaligus berjuang untuk mewujudkan dunia yang lebih adil untuk semua, tanpa kecuali.

Solusi reflektifnya, agama harus diangkat ke tingkat spiritualitas, harus menjadi terbuka pada perbedaan dan perubahan. Bukankah manusia beragama (*homo religiosus*) adalah kodrat alami? Apa pun latar belakangnya, setiap manusia akan menciptakan agama. Agama adalah gejala universal semua peradaban, tanpa kecuali. Jika amatan ini jitu, mengapa banyak manusia Indonesia kiwari memilih tidak beragama di abad ke-21 ini? Reza AA Wattimena menjawabnya dengan jatmika dalam buku ini.

Lalu jatuhlah satu pepatah Cina kuno yang mengatakan, “Alat yang baik di tangan orang jahat akan menjadi alat yang jahat.” Sebaik apa pun ajaran suatu agama, jika dianut oleh sekumpulan orang yang menderita dan tersesat, agama itu akan menjadi jahat yang menghasilkan penderitaan bagi banyak orang (hlm 157).

Anton Suparyanta, esais dan peresensi buku mukim di Klaten-Jateng



The Science of Fictions

Sutradara:

Yosep Anggi Noen

Pemain:

Gunawan Maryanto,
Yudi Ahmad Tajudin,
Lukman Sardi,
Ecky Lamoh,
Alex Suhendra,
Marissa Anita,
Rusini, dan
Asmara Abigail
DLL

Produksi:

Angka Fortuna Sinema

Penghargaan:

Locarno International
Film Festival –
International
Competition: Special
Mention



The Science of Fiction, Benarkah ada Pendaratan di Bulan?

B “Bagaimana kebohongan direproduksi dan sejauh mana kita mengimaninya sebagai kebenaran”

Yosep Anggi Noen, sutradara berbakat asal Indonesia kembali menciptakan film apik-memesona. *The Science of Fiction* atau Hiruk-Pikuk Si-Alkisah berhasil mendapat slot tampil di *Locarno Film Festival* dan tayang perdana di *Busan International Film Festival* dalam program “*A Window on Asian Cinema*” 2019 lalu.

Sebelumnya, Tahun 2016 Noen mengangkat film yang menggambarkan sosok Wiji Thukul dalam judul *Istirahatkanlah Kata-Kata*. Wiji Thukul seorang penyair dan

aktivis yang hilang saat menyuarakan kebenaran di tengah masyarakat.

Noen kembali memilih Gunawan Maryanto sebagai tokoh Siman dalam film *The Science of Fiction* yang sebelumnya memerankan Wiji Thukul. Selain Gunawan Maryanto, film ini diisi oleh aktor kenamaan seperti Yudi Ahmad Tajudin, Lukman Sardi, Ecky Lamoh, Alex Suhendra, Marissa Anita Rusini, dan Asmara Abigail. Dalam menggarap film ini, Anggi Noen dibantu oleh Angka Fortuna Sinema, Kawan-Kawan Media, Limaenam Films, ko-produksi dengan Andolfi (Perancis), Astro Shaw (Malaysia), GoStudio (Indonesia), dan Focused Equipment (Indonesia).

The Science of Fiction menceritakan seorang pria pendiam bernama Siman (Gunawan Maryanto) yang tanpa sengaja menyaksikan sebuah syuting pendaratan di bulan oleh para kru asing, di area gumpuk pasir parang Tritis, Bantul pada tahun 1960-an. Kemudian Siman ditangkap oleh para kru film dan lidahnya dipotong agar tidak membocorkan informasi rekayasa pendaratan di bulan.

Sepanjang memainkan peran Siman, Gunawan Maryanto tidak mengeluarkan satu kata sedikit pun. Ia benar-benar mengandalkan gerak tubuh dan ekspresi sebagai penyalur bahasa. Siman menjalankan aktivitas sehari-hari dengan gerakan *slow-motion*, menirukan gerakan khas astronot di luar angkasa. Terkadang ia menari menggunakan kostum astronot saat sedang ada pertunjukan di desa.

Gerakan yang ditampilkan Siman merupakan wujud protes bahwa tidak ada pendaratan manusia di bulan, semua itu hanyalah teori konspirasi buatan orang-orang asing. Siman menolak diam dan berusaha membuktikan kebenaran yang sesungguhnya, walau ia tidak dapat bicara. Konflik pada film ini adalah bagaimana upaya Siman untuk memberi tahu orang-orang di sekitarnya soal hasil temuannya. Namun, cara Siman menjelaskan tidak disambut baik dan malah disebut gila oleh warga di kampungnya.

Dari trailer yang ditampilkan, Noen menambahkan detail waktu dengan kontras warna. Terdapat cuplikan adegan dengan tema hitam putih khas tahun lawas saat Siman ditangkap (menggambarkan masa lalu) serta warna yang kembali masuk menceritakan kehidupan Siman di masa sekarang.

Yosep Anggi Noen membocorkan alasan ia mengangkat kisah kebohongan pendaratan astronot di bulan, “Itu adalah zaman perang dingin dan salah satu yang menarik adalah perlombaan luar angkasa. Saya tertarik untuk menunjukkan dampak konflik politik yang sangat besar pada seorang individu” kata Noen.

Pemutaran film *The Science of Fiction* menunggu jadwal resmi pembukaan bioskop di Indonesia. Film ini berkaitan dengan teori kebenaran yang diciptakan oleh seseorang, tanpa tahu kebenaran itu memang valid dan akhirnya diimani pengikutnya sampai mati. *The Science of Fiction* sebagai refleksi bagaimana seseorang dipaksa bungkam saat ingin mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nantikan kisah Siman dalam memerangi kebohongan pendaratan manusia di bulan.

■ FARIDA UBAY

Kena Semprot

Hari T.S*

M“Mas!” bentak seorang laki-laki paruh baya yang datang entah dari mana sambil membanting setumpuk kertas ke atas meja di hadapanku. Tumpukan kertas itu terdiri dari hasil lab *rapid test Covid-19*, surat keterangan sehat dari dokter, kwitansi pembayaran, tiket pesawat dan beberapa dokumen perjalanan lainnya.

Aku kaget dan langsung naik pitam, berpaling pada laki-laki itu dengan mata membelalak dan wajah memerah. Barangkali aku sudah beranjak dan memukul lelaki itu kalau saja sesaat kemudian aku tidak menyadari kedudukanku. Aku sedang menjalankan tugas di bawah naungan sebuah rumah sakit. Dalam tugas ini, tentu saja aku tidak bisa bertindak sekehendak hati. Jadi alih-alih merangsak maju dan menghantam, dengan wajah yang masih merah padam, kupersilakan laki-laki itu duduk untuk mengungkapkan masalahnya.

“Saya sudah keluar uang ratusan ribu untuk *rapid test!*” katanya dengan nada tinggi, protes, tidak terima. Dia berbicara seakan-akan dirinya adalah manusia yang diperlakukan dengan cara yang paling tidak adil. “Kemarin katanya hasil ini berlaku satu minggu. Hari ini di bandara saya gagal terbang, petugas di sana melarang saya masuk karena hasil lab ini sudah kadaluarsa. Padahal baru enam hari. Kata petugas di bandara masa berlakunya hanya tiga hari. Saya tidak jadi berangkat kerja. Tiket saya hangus! Bagaimana bisa begitu? Saya merasa ditipu oleh rumah sakit ini!”



Meskipun suaranya tidak terlalu keras juga, tapi semua orang yang ada di tempat ini mendengar apa yang dia katakan sambil mencak-mencak kesetanan itu. Kupejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri lebih jauh lagi. Saat ini aku butuh kesabaran yang benar-benar tinggi. Aku tidak kenal orang di hadapanku, dan tiba-tiba saja dia datang dengan sejumlah bentakan. Meski begitu, aku tidak menuruti emosi. Setelah menghela nafas panjang, aku mulai menanggapi orang itu.

“Maaf, bisa saya lihat hasil lab-nya, Pak?” tanyaku pura-pura. Hanya sebagai formalitas saja, sebenarnya

Aku tidak perlu melihat hasil yang dimaksud untuk memahami masalah orang itu. Aku sudah tahu. Orang itu mengambil *rapid test* agak jauh dari hari keberangkatannya ke luar kota menggunakan pesawat terbang. Ketika dia mengambil tersebut, peraturan pemerintah yang berlaku adalah bahwa masa berlaku hasil tes itu satu minggu. Lewat tiga hari, pemerintah mengubah aturannya. Masa berlaku hasil tes yang baru hanya tiga hari, dan itu menjadikan hasil lab si laki-laki (dan banyak orang lain, tentunya) kadaluarsa. Sejujurnya, kupikir tidak salah jika dia kecewa berat. Salahnya adalah, dia menanggapi keadaan dengan penuh emosi, lalu menumpahkan seluruh emosi itu ke aku. Salah tempat Kau, Bung!

“Hm...” kataku sambil mengerutkan dahi dan berusaha agar sebisa mungkin agar wajahku terlihat tenang. Kepura-puraan secara berangsur-angsur menghilangkan merah dari wajahku. Dan memang, emosi tidak boleh di-

tanggapi dengan emosi juga.

“Begini, Bapak. Hasil ini valid...”

“Tapi kok kadaluarsa?” lelaki itu segera memotong.

“Kami hanya memberikan hasil lab sesuai dengan uji terhadap sampel darah yang bersangkutan, Pak. Masa berlaku hasil tersebut untuk keperluan perjalanan ditetapkan oleh pemerintah.”

“Tapi minggu lalu dibidang masa berlakunya satu minggu! Staff di sini yang bilang. Orang itu juga pastinya teman Anda, bukan?” Orang itu masih ngotot, kedua bola matanya seperti akan copot.

“Betul. Memang minggu lalu pemerintah menetapkan masa berlaku hasil itu satu minggu. Itu informasi yang sampai ke kami dan kami menyampaikan hal itu sebagaimana adanya ke seluruh pasien yang datang. Jadi, meskipun Bapak menerima informasi tersebut dari kami, namun kami semata-mata hanya menyampaikan apa yang diputuskan pemerintah.

Sayangnya dua atau tiga hari yang lalu keputusan tersebut diubah. Bagaimana ya... Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, hasil lab ini tetap valid. Keabsahan hasil ini tidak berubah karena ia bergantung pada sampel darah dan bukan keputusan pemerintah. Kalau Bapak hendak melakukan negosiasi, hendaknya dengan pihak yang memberi izin jalan ke Bapak. Mungkin maskapai yang bapak gunakan jasanya, atau petugas di bandara. Saya kurang tahu soal ini.”

“Sudah telat! Wong pesawatku sudah berangkat.”

“Baik. Yang jelas rumah sakit ini hanya memberikan hasil, Pak. Nego dengan kami adalah seputar keabsahan atau kevalidan hasil tersebut. Misal, pada hari yang sama Bapak mengambil *rapid test* lain di rumah sakit yang berbeda, tapi hasil yang keluar jauh berbeda. Maka layak dipertanyakan hasil mana yang valid. Hal-hal seperti itulah yang bisa diurus dengan kami, bukan hal-hal yang sangkut pautnya dengan keputusan pemerintah.”

Orang itu lalu menekankan ibu jari kanannya ke bibir. Barangkali itulah gayanya berpikir. Dia mendengus pendek sebelum berkata, “Ya sudah! Kalau begitu saya mau tes lagi. Bos saya sudah marah-marrah karena saya belum berangkat juga.”

“Bapak sudah membeli tiket baru?”

“Ya belum lah! Saya barusan dari bandara, masih kesal karena gagal berangkat. Mana sempat beli tiket baru? Mikir dong, Mas!”

Sekarang ganti aku yang mendengus.

“Saya sarankan untuk membeli tiket dulu, baru kemudian *rapid test*, Bapak.”

“Lho? Kenapa begitu?”

Begitulah, orang yang kepalanya dikuasai emosi cenderung tidak bisa berpikir jernih. Dia baru saja mencak-mencak karena hasil lab-nya dianggap kadaluarsa oleh peraturan, tapi kemudian tidak terpikir olehnya untuk mengambil tes baru ketika sudah membeli tiket. Bagaimana kalau dia tes hari ini, lalu tiket pesawat ke tempat tujuannya baru tersedia tiga hari lagi? Dengan

ketatnya prosedur perjalanan yang diberlakukan sekarang dan terbatasnya jalur penerbangan yang dibuka selama wabah Covid-19

ini berlangsung, kehabisan tiket sangat mungkin terjadi. Sementara jadwal keberangkatan pesawat bisa diubah-ubah sesuai keputusan maskapai, tanggal *rapid test* tidak. Orang itu rentan mengundang masalah yang sama jika dia mengambil tes sebelum membeli tiket.

“Sebab dengan pendeknya masa berlaku hasil lab, yang sekali lagi, ditetapkan oleh pemerintah, masalah yang terjadi pada Bapak hari ini sangat mungkin terulang lagi.

Dia terdiam. Sekali lagi, dia tekankan ibu jarinya ke bibir.

“Seandainya Bapak mengambil tes sekarang, lalu ternyata ketika membeli tiket, penerbangan ke tempat tujuan Bapak baru ada tiga hari lagi, nanti tesnya sia-sia lagi, Pak. Saran saya adalah, Bapak membeli tiket dulu, dengan begitu jadwal keberangkatannya pasti. Baru mengambil tes sehari sebelum keberangkatan. Itu lebih menjamin keamanan yang terkait dengan masa berlaku hasil lab ini.”

“Baiklah kalau begitu,” katanya. Orang itu bangkit begitu saja dari kursi yang semulia dia duduki, langsung melewat meninggalkan. Jangankan minta maaf karena sudah marah-marrah di tempat yang salah, dia bahkan pergi tanpa permisi.

“
...BEGITULAH, ORANG YANG
KEPALANYA DIKUASAI EMOSI
CENDERUNG TIDAK BISA
BERPIKIR JERNIH. DIA BARU
SAJA MENCAK-MENCAK
KARENA HASIL LAB-NYA
DIANGGAP KADALUARSA
OLEH PERATURAN.....”

Ibu-ibu yang duduk tak jauh dari sana berpaling padaku dengan tatap mata iba. "Yang sabar ya, Mas..."

Untuk membalasnya, kuulum seukir senyum. "Terima kasih, Bu. Saya dan teman-teman di sini sudah terbiasa dengan munculnya satu-dua orang seperti tadi."

Aku lalu jatuh dalam perenungan. Kenapa juga pemerintah menetapkan masa berlaku satu minggu, kemudian memperpendeknya menjadi tiga hari? Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus, berbeda dari penyakit-penyakit tidak menular seperti, misalnya, penyakit gula darah. Taruhlah Anda mengambil tes untuk gula darah, dan hasilnya menunjukkan bahwa kadar gula dalam darah Anda masih berada dalam batas-batas yang aman menurut rujukan dalam bidang medis, maka Anda akan tetap aman sejauh kita menjauhi makanan-makanan yang dapat memicu penyakit tersebut. Anda akan tetap aman dalam hitungan minggu, bulan bahkan tahun selama Anda berhati-hati dalam menjaga pola makan.

Lain halnya dengan penyakit akibat virus. Ini berlaku untuk virus apa pun termasuk Virus Corona. Kalau pun seandainya hasil tes Anda menyatakan 100% bahwa saat ini tidak ada Virus Corona dalam tubuh Anda, siapa yang bisa menjamin bahwa lima menit kemudian Anda masih tetap aman? Mungkin saja, setelah melihat hasil tes tersebut, Anda menyengkeram gagang pintu sebuah swalayan atau toko kelontong yang di situ si virus sudah siap menjangkiti inang baru, yaitu Anda.

Bisa juga, sesaat setelah melihat hasil lab yang negatif itu, Anda kemudian menerima uang kembalian dari seorang tukang parkir yang sudah tertempel Virus Corona, dan kemudian Anda mulai menyeka sudut mata tanpa sadar sebelum menyuci tangan dengan sabun. Atau, Anda kemudian pergi ke tempat yang dikunjungi banyak orang dan tanpa sengaja salah satu orang itu telah tertular Covid-19 lalu bersin di dekat Anda. Intinya, Anda tidak

pernah tahu. Anda tidak bisa merasa Aman hanya dengan selembar hasil tes yang menyatakan bahwa Anda "negatif". Belum lagi, dalam hasil *rapid test* itu ditulis dengan jelas, bahwa "negatif" bukan berarti tidak ada Virus Corona dalam tubuh Anda, bisa jadi sebenarnya si virus sudah berada dalam tubuh Anda, namun ketika Anda melakukan tes dia belum beranak pinak sehingga tidak terdeteksi oleh peralatan di laboratorium.

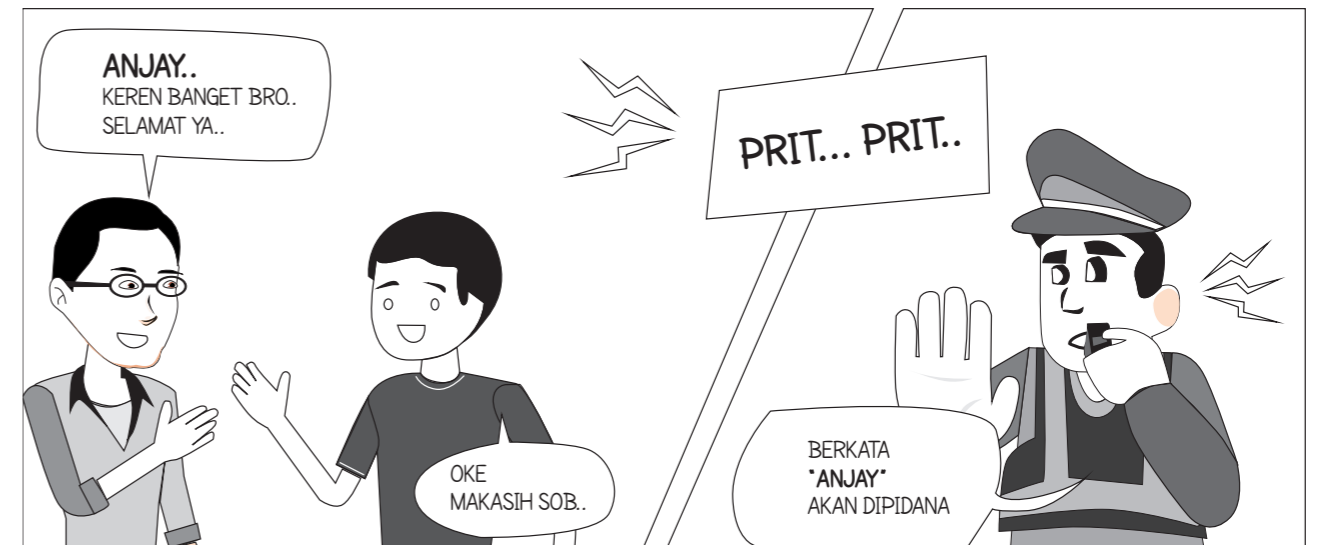
Jadi, sebenarnya hasil lab itu tidak punya masa berlaku, sehingga masa berlaku yang ditetapkan itu lebih bersifat administratif saja. Dengan begitu, seharusnya pemerintah menetapkan masa berlaku yang pendek sejak awal sekaligus menyosialisasikan informasi ini seluas-luasnya sehingga masyarakat tidak dibuat bingung. Laki-laki tadi hanya satu contoh orang yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan itu. Bayangkan berapa banyak orang yang menderita kerugian serupa karena keputusan tersebut. Tidak hanya itu, orang yang tidak ada sangkut-pautnya pun, seperti aku, ikut terkena dampak, kena semprot.

Aku bahkan bukan karyawan di rumah sakit ini. Aku hanya relawan yang mendaftarkan diri untuk membantu menanggulangi wabah Virus Corona karena rumah sakit yang bersangkutan kekurangan tenaga. Tugasku sekadar mendata para pasien yang hendak melakukan *rapid test*, mengukur suhu badan mereka menggunakan termometer dahi, menyentang kolom-kolom di formulir *screening* yang menanyakan apakah pasien yang bersangkutan punya gejala-gejala yang mengarah ke Covid-19 atau tidak, menyerahkan formulir itu ke suster di dalam klinik, lalu menyuruh pasien itu menunggu panggilan dari suster tadi di tempat yang disediakan. Idenya adalah, agar si pasien tidak berjalan-jalan di sekitar rumah sakit untuk memperkecil risiko penularan seandainya memang dia sudah terjangkit Covid-19.

Jadi ya... begitulah.

“
AKU LALU
JATUH DALAM
PERENUNGAN.
KENAPA JUGA
PEMERINTAH
MENETAPKAN MASA
BERLAKU SATU
MINGGU, KEMUDIAN
MEMPERPENDEKNYA
MENJADI TIGA HARI?

*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel *The Jazab Boy* (Diva Press, 2012), *Mandaraka* (RWTC, 2017) *Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan* (Bebook Publisher, 2016), *Sajak-Sajak Rembulan Biru* (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.



ANJAY...
KOMIK BANG PEPE



Rekonstruksi Habitus Pilkada di Tengah Pandemi

PERPPU Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memastikan pelaksanaan pilkada serentak 2020 mundur, yang semula September menjadi Desember 2020.

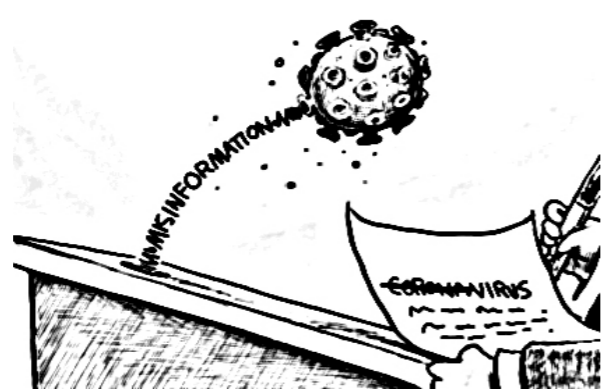
Pasalnya pandemi virus corona di Indonesia belum kunjung mereda. Lima bulan diterpa wabah, kini angka positif virus corona di Indonesia telah menembus 132.816 kasus. Hingga tulisan ini dibuat, penambahan kasus baru di Indonesia mencapai 2.098 kasus, dengan total pasien sembuh berjumlah 87.558 orang. Sementara, pasien meninggal dunia sebanyak 5.968 orang.

KPU sendiri telah merancang Peraturan KPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19). KPU memasang sembilan tahapan itu mulai dari pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP; pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih; pencalonan; pelaksanaan kampanye; laporan dana kampanye; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan; sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan pengamanan perlengkapan pemilihan. KPU memastikan tahapan-tahapan itu dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat pemilihan 2020.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud itu meliputi pelaksanaan *rapid test* bagi penyelenggara, pengecekan suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengaturan larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta di setiap tahapan, pelibatan Tim kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta pemanfaatan media daring untuk menggantikan pertemuan, dan kampanye mendulang suara.

Ruang publik di masa pandemi

Dalam konteks pandemi, praktik-praktik mendulang suara di ruang publik menjadi sebuah diskursus prioritas. Di mana kebijakan publik harus sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan. Jangan sampai pelaksanaan kebijakan publik tidak bertujuan untuk pencapaian kebaikan publik (*common bonum*).



Sebagai contoh, jika salah satu bakal calon kepala daerah mengambil cara kampanye secara konvensional, yaitu bertemu langsung, dengan mengumpulkan masa sebanyak 1000 orang dalam satu tempat, tanpa adanya pengawasan dan protokol kesehatan, tentu ini tidak membawa kebaikan. Virus Covid-19 akan tumbuh bak jamur di musim penghujan.

Padahal, jika kita melihat laporan tercatat, Agustus 2020 ini sebanyak 83% daerah memiliki potensi risiko terpapar Covid-19. Terdapat 33 (6.42%) daerah yang memiliki risiko tinggi. Sebanyak 222 daerah (43.19%) memiliki risiko sedang, dan sebanyak 177 daerah (34.44%) memiliki risiko rendah. Selebihnya hanya 47 daerah (9.14%) dengan predikat tidak ada kasus dan 35 daerah (6.81%) yang tidak terdampak. Fakta ini menggambarkan hampir sebagian besar daerah memiliki risiko terhadap Covid-19. Setidaknya total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini, tercatat sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Rekonstruksi habitus baru

Mengacu pada kasus di atas, rekonstruksi habitus baru dalam pilkada di masa pandemi, harus dengan cara-cara yang dibenarkan. Habitus merupakan pemaknaan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainan (*feel for the game*) yang melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Secara eksplisit, habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial, atau struktur sosial yang dimaknai, dan disepakati masyarakat sebagai nilai-nilai yang dibenarkan.

Demokrasi dan media memiliki hubungan yang resiprokal. Di satu sisi demokrasi membutuhkan media sebagai alat komunikasi politik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di sisi lain media hanya dapat berfungsi bagi kepentingan masyarakat luas dalam sistem politik yang demokratis. Lebih lagi di masa pandemi, pemilihan media yang tepat akan menyelamatkan kita dari tingginya bahaya covid-19.

Di tengah suasana semacam itu, struktur sosial dan ruang publik mengalami transformasi mendasar. Ketika kehidupan manusia mau tidak mau, terhubung dalam jaringan global

berbasis yang menghilangkan batas teritorial serta mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses interaksi. Dalam kasus ini, peran teknologi menjadi dominan dalam menyampaikan pesan dari kontestan.

Meminjam gagasan dari Castells, kampanye dalam ruang digital akan menghasilkan meritokrasi. Meritokrasi adalah bentuk pemerintahan atau administrasi, di mana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka. Castells mendukung prinsip meritokrasi, ia menegaskan bahwa kapitalisme saat ini dipimpin oleh orang-orang dengan modal informasi, sementara kepemilikan modal ekonomi tidak lagi mencukupi untuk mengontrol tuas kekuasaan.

Setidaknya, keuntungan kita menggunakan kampanye digital adalah Pertama, masyarakat jaringan (*network society*), yakni suatu struktur sosial masyarakat terbentuk oleh komunikasi berbagai jaringan digital. Jaringan digital ini mematahkan jarak dan waktu. Misalkan saja, seorang kandidat berada di kabupaten A, konstituen berada di daerah B, dalam kesatuan provinsi. Tetapi dengan jaringan digital, sebuah visi-misi kontestan dapat dengan mudah dipahami oleh konstituen.

Kedua, konsep kekuasaan membutuhkan pemahaman atas kekhususan berbagai bentuk dan proses komunikasi sosial termasuk di dalamnya adalah media massa dan komunikasi jaringan horisontal yang dibangun oleh komunikasi internet dan nirkabel. internet merupakan salah satu bagian dari *Communication in the digital age* (komunikasi di era digital), di mana kondisi ini adalah kondisi di mana komunikasi yang terjadi sudah dilakukan melalui media-media digital seperti televisi, radio dan internet. Munculnya komunikasi yang dilakukan melalui jejaring internet lebih sering disebut Manuel Castells dengan istilah *mass self-communication*.

Ketiga, kekuasaan adalah kapasitas relasional yang memungkinkan seorang aktor sosial mempengaruhi keputusan aktor sosial lain secara asimetris untuk mengikuti kemauan, minat, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Definisi kekuasaan ini menjelaskan bekerjanya jaringan sosial. Contoh nyata dalam fenomena ini adalah kemenangan Barack Obama untuk kedua kalinya dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat. Beberapa faktor yang mendukung kemenangan Obama kala itu di antaranya ditengarai dari dua faktor, ekonomi dan kesetaraan gender.

Beberapa kebijakan Obama selama memimpin AS, menurut para analis, telah memberi pengaruh positif terhadap perekonomian negeri tersebut. Obama dinilai telah berperan dalam mencegah jatuhnya industri otomotif di Amerika dan menyelamatkan lapangan pekerjaan.

Hal mengejutkan dari pemilihan presiden di AS kali ini berhubungan dengan kesetaraan gender. Obama rupanya mampu menarik simpati dari para pemilih perempuan dan kelompok-kelompok minoritas, seperti kaum Hispanik. Inilah kunci kemenangan Partai Demokrat atas Partai Republik yang mengusung Mitt Romney sebagai calon presiden. Selama ini, Republik dikenal dengan pandangan-pandangan ekstremnya terhadap isu aborsi, imigrasi, hak-hak sipil, dan pernikahan sejenis. Sementara Demokrat lebih terbuka kepada perubahan dan isu-isu sosial tersebut.

Pesan yang dapat diambil dari keberhasilan itu adalah, jika orang ingin mendengarkan kita, kita pun harus mau mendengarkan orang lain. Prinsip ini sangat sederhana. Kepercayaan dibangun lewat komunikasi. Ketika seorang pemimpin mau duduk bersama, mendengarkan pendapat serta permasalahan yang dihadapi oleh timnya; saat itu pula anak buah akan merasa dihargai. Kepercayaan mereka terhadap pemimpin akan tumbuh.

Obama pun menunjukkan sikap terbuka, membangun komunikasi, dan berusaha memahami isu-isu sosial yang ada di negerinya. Hal ini membuat kaum minoritas di Amerika, yang selama ini merasa kurang diperhatikan, merasa dihargai. Mereka mendapatkan pengharapan. Mereka merasa diterima, sehingga percaya dan mau memberikan suaranya untuk Obama.

Di Indonesia, habitus baru juga ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, Upaya deregulasi, sebagai bagian strategi harus hadir dalam bentuk baru regulasi ramping yang mampu menciptakan habitus politik baru untuk kepentingan publik. Tantangan paling besar dari upaya rekonstruksi habitus politik berasal dari struktur regulasi lama dan elite-elite politik yang mendapatkan keuntungan di bawahnya. Dukungan besar dari elit-elit politik dalam struktur legislatif adalah dalam penyusunan kebijakan regulatif yang bernarasi kepentingan publik. Sebagai contoh nyata, program program di pemerintahan hampir kesemuanya dilakukan melalui jaringan internet.

Meski demikian, di antara bayangan gelap kepemimpinan politik sektional di masa pandemi, bangsa ini masih memiliki harapan dari kemunculan beberapa pemimpin politik transformatif pada 2020. Pemimpin-pemimpin terpilih dapat melandaskan praktik kekuasaan pada konstitusi, demokrasi, dan berpihak kepada kebaikan umum. Bangsa Indonesia tentu berharap semakin banyak pemimpin transformatif, inovatif dan mampu memecahkan masalah. Termasuk masalah tak kunjung redanya pandemi ini.

Adi Suhendra

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



Program PEN dan Kemandirian Petani

DAMPAK bencana wabah pandemi *Covid-19* memaksa pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang luar biasa melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases-2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut mengamanatkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan prioritas utama penanganan pandemi dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Sebagai implementasi Perppu, Pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan menyasar pemulihan dari sisi *demand* dan *supply* dunia usaha. Dari aspek *demand*, kebijakan akan fokus menjaga konsumsi, mendukung dunia usaha sekaligus mempertahankan investasi serta kegiatan ekspor impor. Dalam upaya menjaga konsumsi, pemerintah mengalokasikan tambahan belanja hingga Rp405,1 triliun dengan rincian program subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan melalui tambahan sembako, kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, tambahan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) serta bansos Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek.

Untuk mendukung dunia usaha sekaligus mempertahankan investasi, pemerintah juga merilis paket stimulus dari sisi *supply* diantaranya program subsidi bunga ultra mikro dan UMKM sebesar Rp34,15 triliun untuk relaksasi selama 6 bulan. Berikutnya adalah pola penempatan dana untuk mendukung restrukturisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat dan transparan. Relaksasi skema penjaminan juga diberikan melalui penjaminan kredit modal kerja kepada UMKM baik secara langsung oleh pemerintah atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk seperti PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Diberikan juga insentif perpajakan berupa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% serta pengembalian pendahuluan PPN. Secara total, besaran insentif perpajakan ini mencapai Rp123,01 triliun. Penyelamatan beberapa BUMN terdampak menjadi prioritas PEN berikutnya. Beberapa kriteria BUMN terdampak



berdasar indikator pengaruhnya terhadap hajat hidup masyarakat, peran sovereign yang dijalankannya, eksposur terhadap sistem keuangan, kepemilikan pemerintah dan total asset yang dimiliki. Berdasar kriteria-kriteria ini, deretan BUMN yang mendapat prioritas antara lain PLN, Bulog, Garuda, Kereta Api, Perkebunan Nusantara, Bahan, PNM, Krakatau Steel, Perumnas, Pertamina dan ITDC.

Stimulus petani

Mencermati program PEN secara menyeluruh, petani sejatinya juga menjadi pihak yang perlu diprioritaskan. Apalagi jika berbicara mengenai isu menjaga ketahanan pangan di era pandemi sementara di aspek lainnya, pertanian adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap bencana. Memasuki bulan Maret hingga November setiap tahunnya, bencana kekeringan El-Nino biasanya akan melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk meminimalkan dampak, pemerintah akan segera membentuk tim gugus tugas kendali (*Task Force*) yang senantiasa bersiaga selama potensi bencana mungkin terjadi. Dengan pembentukan *Task Force* tersebut, pemerintah berharap agar tingkat kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu besar sehingga mempengaruhi pencapaian target produksi padi maupun komoditas pertanian lainnya. Secara spesifik, tugas utama *Task Force* adalah melakukan pemantauan terhadap potensi kekeringan di masing-masing daerah sehingga organisasi penanggulangan dapat dibentuk mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kelembagaan di pusat.

Begitu mulai terjadi kekeringan yang berimbas ke areal pertanian ataupun perkebunan, anggota *Task Force* akan wajib membuat laporan berikut analisisnya untuk kemudian dilaporkan kepada tim khusus pusat di Kementerian Pertanian (Kementan). Periode Maret tahun 2018 misalnya terjadi beberapa bencana di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan beberapa daerah sekitarnya. Di daerah yang berada di pedalaman kawasan pantai utara (pantura) tersebut juga sempat teridentifikasi mengalami potensi kekeringan seluas 10 ribuan hektare. Dari hasil evaluasi awal, ada 6 provinsi yang mendapat pengawalan ketat dari potensi kekeringan, karena diidentifikasi sebagai lumbung pangan nasional. Ke-6 daerah itu masing-masing adalah Jatim, Jateng, Jabar, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Utara.

Selain potensi bencana kekeringan, *Task Force* juga diharapkan mampu mengambil kebijakan yang strategis terkait kejadian bencana lainnya. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa medio awal tahun 2019 juga tak luput dari pengamatan

tim tersebut. Aliran banjir yang terjadi telah menghancurkan beberapa fasilitas infrastruktur pelayanan publik sekaligus merusak 230 hektar lahan pertanian yang seyogyanya siap panen serta merugikan 14.280 keluarga. Beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pusat banjir terkonsentrasi di Klaten, Wonogiri dan Sukoharjo. Sedangkan di Provinsi DIY, peristiwa banjir ditemui di Gunung Kidul sebanyak 4 kecamatan.

Mengingat begitu rentannya petani dan lahan pertanian terhadap beberapa potensi bencana alam, penulis memandang perlunya dukungan skema perlindungan yang permanen terhadap petani melalui program asuransi pertanian. Terlebih jika dampak tersebut mengancam pencapaian target kedaulatan pangan yang sudah ditargetkan sejak lama. Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga sudah mengesahkan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Regulasi tersebut sebetulnya sudah memberikan banyak terobosan positif dalam mencapai target kedaulatan pangan di Indonesia. Salah satu langkah revolusioner yang diatur dalam UU P3 adalah kewajiban pemerintah melindungi usaha tani melalui pembentukan asuransi pertanian.

Di dalam Pasal 37 UU No19/2013 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Pengaturan tersebut dikuatkan dengan pasal 39 ayat 1 yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemda memfasilitasi peserta asuransi pertanian dalam bentuk bantuan pembayaran premi asuransi. Pembayaran premi tersebut dilakukan sampai petani dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemda mampu membayar preminya sendiri dengan mendasarkan pada skala ekonomi petani. Yang dimaksud skala ekonomi petani adalah nilai komersial minimum yang harus dimiliki atau dicapai agar usaha tani yang dilakukan oleh petani memiliki keuntungan, dimana skala ekonomi masing-masing petani tentu berbeda untuk setiap komoditas tanaman yang diusahakan.

Di level teknis, Kementan juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Di dalam Permentan tersebut, nantinya akan diatur mengenai jenis dan fasilitas asuransi pertanian, pembinaan serta pelaporan. Di dalam pengaturan jenis dan fasilitas asuransi pertanian, disebutkan bahwa asuransi ini nantinya akan melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan OPT, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan/atau jenis-jenis risiko lain. Sebagai tahap awal, jenis asuransi yang dikembangkan adalah asuransi tanaman dan asuransi ternak. Yang masuk dalam kategori asuransi tanaman adalah asuransi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sementara asuransi ternak adalah ternak ruminansia, *non-ruminansia* dan *monogastrik/pseudoruminant*.

Meskipun asuransi pertanian dianggap cukup krusial, namun banyak kendala yang akan menjadi hambatan pelaksanaannya di lapangan. Kendala terbesar tentu masalah kesadaran yang belum terbangun di masing-masing petani tentang arti pentingnya asuransi pertanian. Problem rendahnya kemampuan petani membayar premi menjadi hambatan lainnya. Karenanya pemerintah wajib memberikan bantuan premi asuransi. Tahun 2012 dan 2013, AUP ini telah sukses diujicobakan dengan menggandeng kemitraan beberapa BUMN pupuk seperti PT Petro Kimia, PT Pupuk Kujang serta PT Pupuk Sriwijaya. Ujicoba dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan.

Khusus untuk fasilitas bantuan premi, sedianya akan diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan penggarap paling luas 2 (dua) hektar, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar dan/atau petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga pertanggung AUP ditetapkan sebesar Rp6 juta/Ha sebagai nilai santunan kerugian untuk membantu biaya menanam kembali, termasuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja dan pupuk. Harga pertanggung menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian. Premi tersebut akan disubsidi Kemitraan (Perusahaan BUMN Pupuk) sebesar 80% dan petani 20%.

Pemerintah melalui Kementan mengharapkan nantinya asuransi pertanian ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, mengingat pertanian merupakan salah satu usaha yang rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan panen. Beberapa pihak terutama perwakilan petani menyambut gembira rencana tersebut seraya menyampaikan harapan agar program dapat sesegera mungkin dijalankan. Dengan adanya perlindungan ini, petani tentunya akan merasa aman di dalam melakukan aktivitas pertaniannya dan dengan sukarela akan membayar premi Rp36.000 per ha sementara sisanya ditanggung pemerintah. Jika terjadi kegagalan panen, maka petani mendapatkan klaim sebesar Rp6 juta per ha.

Program ini juga dianggap sebagai upaya terbaik pemerintah untuk menghapus stigma petani dan kemiskinan. Tanpa berbasasi-basi lagi, sekaranglah saatnya pemerintah mendukung sektor pertanian. Sudah saatnya para petani dimulihkan derajatnya oleh negara khususnya di era pandemi seperti sekarang. Terlalu lama pertanian dibiarkan tumbuh tanpa perlindungan. Ingat kalimat bijak Jawaharlal Nehru dan tertulis diperpustakaan Indian Agricultural Research Institute (IARI), Campus Pusa, New Delhi “*All can wait, unless agriculture*”.

Joko Tri Haryanto
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan



Parno

ANDAI saja bukan karena perintah atasan di kantor, mungkin saya juga enggan melakukan *swab test* untuk korona. Alasannya sederhana, selama ini saya merasa sehat-sehat saja dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Memang sejak adanya kasus pertama terkonfirmasi positif korona di kantor, semua pegawai di dalamnya jadi kalut. Setelah itu, pimpinan langsung mengambil kebijakan untuk mewajibkan semua pegawai di lingkungan kantor untuk melakukan tes korona itu.



Negatif

Selang beberapa hari, hasil tes *swab* saya keluar. Melalui uji klinis itu saya dinilai negatif terjangkit korona. Betul melegakan, karena perkara tes *swab* ini, sifat saya yang mudah *parnoan* semakin menjadi. Perasaan itu disebabkan bukan karena dampak dari penyakit korona ke badan saya, namun lebih kepada bagaimana respons sosial yang akan saya terima seandainya saya didiagnosis positif. Apalagi saya hidup melajang sendiri, di kamar indekos petak 3x4 yang berjubal dengan penghuni lainnya. *Taulah* hidup melajang sendiri di Ibukota, urusan mencari makan sehari-hari saja sudah buat saya susah. Apalagi jika seandainya pemilik rumah indekos tahu kalau saya membawa virus korona itu ke tempatnya. Mungkin saya bisa saja dipaksa *minggat*, karena pasti tidak mau mengganggu kenyamanan penyewa lainnya. Lantas kemudian digelandang ke tempat isolasi di Wisma Kemayoran, yang menurut saya sebagai tempat perampas kemerdekaan. Saya juga bakal jadi topik terkini yang banyak dibahas di berbagai grup *whatsapp*. Belum lagi orang tua di kampung halaman juga bakal khawatir setengah mati.

Hal-hal itulah buat saya sempat susah sekali tidur menjelang hasil pengumuman tes *swab* keluar. *Yah* tapi syukurlah, hal-hal malang yang sempat saya pikirkan itu tidak terjadi. Dengan predikat negatif korona, saya merasa mendapat tiket untuk diterima di kehidupan sosial kembali. Masuk kantor dan beraktivitas dengan normal sebagai manusia sehat.

Positif

Hilang beban pikiran, badan saya terasa ringan untuk kem-

bali bertugas di kantor hari itu. Baru sebentar berlutut dengan laporan. Saya *kok* mendengar rekan di ruangan riuh saling berbicara. Karena terdengar samar, saya penasaran menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan hingga seribut itu.

Dan saya benar-benar kaget, ternyata salah satu rekan terdekat dalam satu ruangan baru saja mendapat kabar melalui telepon. Dia dinyatakan positif korona. "Hah, kok bisa sih?", seingatku itu kalimat pertama yang saya ucapkan ke dirinya. Tatapannya nanar dan terlihat dia menahan air

mata dengan bibir yang masih bergetar. Padahal dia merasa sangat fit dan tanpa gejala apapun. Malangnya kondisi dia sama dengan saya. Seorang perantauan yang masih melajang dan tinggal di indekos dengan luas yang tidak seberapa.

Sebagai rekan kerja, tentu saya coba untuk menguatkan dan menenangkan dirinya. Sialnya sifat *parnoan* saya kembali lagi. Perlahan saya mengambil sikap untuk menjaga jarak dengan dirinya, sembari membenahi masker yang sebelumnya saya pakai dengan asal. *Hand sanitizer* pun saya semprotkan ke tangan berkali-kali. Gestur yang mungkin membuat dia semakin berkecil hati.

Setelah kami berdua berdiskusi sebentar, akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama ke dua belas rekan kantor lainnya yang juga didiagnosis positif korona ke tempat isolasi Wisma Atlit. Seperginya dirinya, semua meja kursi dan barang pribadinya di ruangan saya sterilkan. Saya pun tidak jadi melanjutkan kerja dan beranjak pulang ke indekos untuk mandi dan mengganti baju serta merendamnya dengan deterjen.

Virus korona memang begitu antagonis. Kurang ajarnya selain merusak organ tubuh, dia bisa sekaligus menciutkan mental penderitanya karena terpaksa "dikucilkan" dalam hubungan sosial. Dianggap sebagai pembawa mala yang harus diisolasi meski tanpa gejala atau rasa sakit apapun. Mungkin konsekuensi sosial itu yang lebih berat dirasakan oleh para penderita, terutama di masyarakat kita yang cenderung solider. Lantas saya berpikir *kok* ya ada gunanya juga *parnoan*, di musim-musim seperti ini.

■ AJI NUR CAHYO

INFORMASI KELITBANGAN DALAM SATU SENTUHAN



LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

@badanlitbangkemendagri



Badan Litbang Kemendagri

@LitbangKDN



@badanlitbangkemendagri

@badanlitbangkemendagri





Badan Litbang
KEMENDAGRI



Accredited Number : 21/E/KPT/2018 (Sinta 2)

Call for PAPER

Jurnal Bina Praja

Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders. JBP publishes original research manuscripts, review articles, studies, and case studies that focus on home affairs governance.

TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscripts have not been published in other media
- Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English)
- For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>
- A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports)
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

JBP Journal of Home Affairs Governance

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index

MAY & NOVEMBER

For more details : 08812-1941-9885 / redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:

